

**PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG
DALAM PELAKSANAAN PILKADA
TAHUN 2008**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Ilmu Politik
Pada Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro**

oleh :

**MARLINI TARIGAN
NIM. D4B007022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2009**

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul:

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2008**

yang disusun oleh Marlini Tarigan, NIM D4B007022 telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal Mei 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Ketua Penguji

Anggota Penguji Lain
1.

Dra. Fitriyah, MA

2.

Sekretaris Penguji

.....

Semarang, Mei 2009
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi Magister Ilmu Politik
Ketua Program

Drs. Purwoko, MS

PERSEMBAHAN/MOTTO

Tentang kehidupan.....

Ambillah setiap kesempatan dan pikullah tanggung jawabnya. Jangan hanya mau indahnya saja, tapi terimalah pula kepedihan di dalam sana. Terima setiap pilihanmu dalam suatu paket baik buruknya. Itulah hidup yang bagi kita adalah berani menerima tantangan, dan berani mempertanggung jawabkan. Sebuah pilihan pasti sarat dengan cobaan. Jangan kau pandang sebagai sebuah masalah, tapi camkan sebagai sebuah ujian hingga kau tertantang mengurai dan mendapatkan jawabannya.

Memilih belum tentu benar, tapi benar didapat dari memilih. Jadi apapun itu, jika kamu menetapkan untuk tidak memilih, pada dasarnya tetaplah memilih.

Karya ini didedikasikan untuk:

Alm. ayahanda yang tak sempat melihat keberhasilanku namun ku yakin “disana” tetap bangga akan keberhasilanku,
Ibunda tersayang yang telah melahirkanku ke dunia ini dan membesarkanku, tak ada yang bisa membalasnya bunda,
kakak n abang yang telah mendukungku,
Keluarga kecilku, manda yang selalu mendampingiku, ananda tercinta danis n fazil adalah anugrah terindah yang pernah kumiliki, semuanya telah terlewati.....semoga bisa menjalani hari depan lebih baik lagi...amien

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Ilahi Robb penguasa alam yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam tak lupa peneliti panjatkan kepada Khalifatul fil ardl, Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan yang sempurna.

Karya tulis ini merupakan suatu apresiasi yang peneliti wujudkan selama mengadakan penelitian di Temanggung. Berbagai informasi yang diperoleh selama penelitian merupakan pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga dan hasilnya telah dituangkan dalam karya ilmiah ini.

Dalam melaksanakan penelitian di lapangan maupun dalam pembuatan laporan banyak sekali masukan-masukan yang peneliti peroleh. Semuanya merupakan masukan yang sangat berharga yang sangat membantu dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada: Drs Purwoko, MS selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik, Drs Tri Cahyo Utomo, MA, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Politik, Dra Rina Martini, M.Si, selaku Bendahara Program Studi Magister Ilmu Politik, serta Sekretariat Magister Ilmu Politik yang telah banyak memberikan bantuan. Dra Fitriyah, MA, selaku pembimbing I dengan penuh kesabaran dan ketulusannya telah banyak disita waktunya selama membimbing penulisan karya ilmiah ini. Masukan yang sangat berharga peneliti terima sehingga mampu untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Drs Turtiantoro, M.Si, selaku pembimbing II yang banyak memberikan masukan dan saran dalam proses

penulisan karya ilmiah ini. Alm. ayahanda tercinta, ibunda tersayang yang tak pernah lelah memberikan doa restunya, serta kakak dan abang yang juga selalu mendoakan keberhasilan peneliti. Suami tercinta Manda Kartiko yang selalu siap memberikan dukungan selama proses penulisan karya ilmiah ini dan juga cahaya hidup yang selalu menghibur peneliti selama penulisan karya ilmiah ini, buah hati yang tak ternilai harganya Luqyana Danisya Fadhilah dan Fazil Mawla Danie, selalu menjadi motivasi bagi peneliti. Rekan-rekan di Magister Ilmu Politik terima kasih atas persahabatan selama ini, begitu juga dengan tim Sekretariat KPU Provinsi, KPUD Temanggung dan Tim Desk Pilkada Temanggung terima kasih atas informasinya. Masyarakat Temanggung yang telah bersedia menjadi responden dalam penulisan karya ilmiah ini dan semua pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung,.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan penulis mempersembahkan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada peneliti.

Semarang, 25 Mei 2009

Marlini Tarigan

ABSTRAKSI PENELITIAN

Penelitian ini menyoroti masalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Dalam pelaksanaan Pilkada langsung, Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Kecenderungan yang ada pada saat ini adalah menurunnya tingkat partisipasi politik dalam pilkada. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Temanggung dalam pilkada.

Penelitian ini menggunakan metode survai dengan maksud untuk penjelasan (eksplanatori). Sasaran dalam penelitian ini adalah pemilih di kabupaten Temanggung. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan sample acak 2 cabang yang menggabungkan sistem acak dan sistem acak proporsional. Adapun jumlah responden adalah 243 orang yang tersebar di 20 kecamatan seKabupaten Temanggung.

Analisis yang digunakan adalah analisa kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis ini meliputi tabel frekuensi, tabel silang, korelasi produk momen dengan taraf kepercayaan 95 dan 99%, dan regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa dari keempat variabel yaitu partisipasi politik (Y), popularitas calon (X1), status sosial ekonomi (X2) dan kondisi sosial politik (X3), variabel popularitas calon dan variabel kondisi sosial politik menunjukkan adanya korelasi dengan partisipasi politik. Sedangkan variabel status sosial ekonomi menunjukkan tidak ada hubungan positif terhadap partisipasi politik. Sedangkan hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa hanya popularitas calon yang mempunyai hubungan positif dengan partisipasi politik, sedangkan variabel status sosial ekonomi dan kondisi sosial politik mempunyai hubungan negative dengan partisipasi politik.

Hasil penelitian ini tidak dapat dijadikan acuan untuk penelitian di wilayah lainnya. Oleh karenanya perlu diadakan penelitian yang sama di wilayah lainnya untuk mengetahui/membandingkan hasil penelitian ini untuk mengetahui lebih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada. Semoga pelaksanaan pilkada di Temanggung bisa menjadi cerminan bagi pelaksanaan pilkada di daerah lainnya. Keberhasilan Temanggung melaksanakan pilkada yang kondusif serta dibarengi partisipasi masyarakat yang tinggi patut dijadikan sebagai satu rujukan. Apalagi dari segi penggunaan anggaran sangat efisien mencegah tingginya biaya demokrasi.

ABSTRACT

This research focuss on the problem of Participation of the community 's politics in the district head 's election, in the implementation of the district head's direct election, Temanggung is one of the regencies in Central Java that the level of high participation, the available trend at the moment is the decline in the level of political participation in the district head 's election, therefore this research is carri out to know factors what influent Temanggung participation of the community 's politics in the district head 's election.

This research us the survey method with the intention for the explanation (eksplanatori). The target in this research is the voter in the Temanggung regency, the taking technique of the sample is us twostage random sampling, that unit the random system and the random system proportional, as for the number of respondents is 243 people who are spread in 20 subdistricts a Temanggung regency.

The analysis that is us is the qualitative and descriptive analysis quantitative that cover the frequency table, the cross table, the correlation of the torque product with the level of the belief 95 and 99%, and linear regression multiplied

Based on the results of data processing show that from the four variables that is political participation (y), the popularity of the candidate (x1), the social status of economics (x2) and the social condition for politics (x3), the popularity variable of the candidate and the social condition variable for politics show the existence of the correlation with political participation, where as variable the social status of economics show did not have relations is positive towards political participation, where as results of the analysis of linear regression multiplied show that only popularities of the candidate who had positive relations with political participation, where as the social status variable of economics and the social condition for politics had relations negative with political participation.

Results of this research could not be made the reference for the research in the other area, therefore must be held by the research that is same in the other territory to know/to compare results of this research of knowing even more factors that influent political participation in the district head's direct election, it is hope the implementation of the district head's direct election in Temanggung could become the reflection for the implementation district head's direct election in the other area, the Temanggung success carry out district head's direct election that is conducive as well as is accompanied by the community 's tall participation ought to be made one reconciliation, everything from the aspect of the use of the budget is very efficient prevent high cost democracy.

The key word: *political participation, the popularity of the candidate, the social status of economics, the correlation, high cost democracy*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Keaslian Tesis	ii
Halaman Persetujuan/Pengesahan	iii
Halaman Motto/Persembahan	iv
Abstract	v
Abstraksi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH	9
1. Perumusan Masalah	9
2. Pembatasan Masalah	10
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
D. KERANGKA TEORI	11
E. VARIABEL-VARIABEL PARTISIPASI POLITIK dan MODEL ANALISA	39

F. ANGGAHAN DASAR DAN HIPOTESIS	44
G. DEFENISI KONSEP/OPERASIONAL VARIABEL	45
H. METODE PENELITIAN	52
BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG	
2.1. Kondisi Sosial Budaya	63
2.2. Kondisi Perekonomian	71
2.3. Kondisi Politik dan Pemerintahan	72
BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN	
TEMANGGUNG TAHUN 2008	78
2.1. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH	79
A. Tahapan Persiapan	79
B. Tahapan Pelaksanaan	80
C. Tahapan Penyelesaian	97
BAB IV GAMBARAN UMUM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT	
KABUPATEN TEMANGGUNG	
A. Identitas Responden	100
B. Partisipasi Politik	101
C. Popularitas Calon	102
D. Status Sosial Ekonomi	105
E. Kondisi Sosial Politik	108

BAB V ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI

PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA

A.	HUBUNGAN POPULARITAS CALON DAN PARTIPASI POLITIK DALAM PILKADA	118
B.	HUBUNGAN STATUS SOSIAL EKONOMI DAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA	122
C.	HUBUNGAN KONDISI SOSIAL POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA	126
D.	ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA	130

BAB VI PENUTUP

	KESIMPULAN	134
	Implikasi Teoritik	136
	Implikasi Praktik	138
	KEPUSTAKAAN	140
	DAFTAR PERTANYAAN/ <i>QUESTIONAIRE</i>	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil Penghitungan Suara Pilpres Tahun 2004 Kabupaten Temanggung ..	5
Tabel 1.2	Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tanggal 22 Juni 2008	6
Tabel 1.3	Perolehan Suara Pilkada Di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	8
Tabel 1.4	Beberapa Defenisi Partisipasi Politik	14
Tabel 1.5	Kampanye Pemilu dan Kampanye Politik	23
Tabel 1.6	Bentuk Partisipasi Politik Versi Milbarth	26
Tabel 1.7	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Jawa Tengah Tahun 2008 Di Kabupaten Temanggung	54
Tabel 1.8	Rekapitulasi Sample <i>Primary Sampling Unit</i> (PSU) Tempat Pemungutan Suara	56
Tabel 1.9	Rekapitulasi Jumlah Responden di masing-masing Kecamatan	58
Tabel 2.1	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Kabupaten Temanggung	64
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk di Kabupaten Temanggung Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	65
Tabel 2.3	Penduduk usia 5 tahun ke atas menurut pendidikan Dirinci perkecamatan di Kabupaten Temanggung	66
Tabel 2.4	Banyaknya Pemeluk Agama Dirinci perkecamatan Di Kabupaten Temanggung	67
Tabel 2.5	Besarnya Swadaya Masyarakat Murni dan Pendukung Kegiatan Pembangunan Dirinci Perkecamatan Di Kabupaten Temanggung	70

Tabel 2.6	Penduduk yang bekerja menurut mata pencaharian	
	Dirinci perkecamatan di Kabupaten Temanggung	71
Tabel 2.7	Pembagian Wilayah Administrasi	
	Dirinci perkecamatan di Kabupaten Temanggung	73
Tabel 2.8	Perolehan Suara untuk 7 Partai Besar pada Pemilu Legislatif	
	Kabupaten Temanggung Tahun 2004	74
Tabel 2.9	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Jumlah Suara pada Pemilihan Presiden	
	Untuk Kab. Temanggung Tahun 2004	75
Tabel 2.10	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Jumlah Suara pada Pemilihan Kepala	
	Daerah Kab. Temanggung Tanggal 22 Juni 2008	76
Tabel 3.1	Daftar Calon Bupati/wakil Bupati Kab. Temanggung Tahun 2008	82
Tabel 3.2	Visi misi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Temanggung	
	Tahun 2008	88
Tabel 3.3	Jadwal Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati	
	Pada Pelaksanaan Pilkada Temanggung Tahun 2008	91
Tabel 3.4	Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Temanggung	
	Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008	93
Tabel 3.5	Komposisi Pemberian Suara Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati	
	Periode 2008-2013	96
Tabel 4.1	Keikutsertaan dalam pemungutan suara	101
Tabel 4.2	Menggunakan hak suara	102
Tabel 4.3	Tingkat Pengenalan Terhadap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati	103
Tabel 4.4	Waktu pengenalan terhadap pasangan calon	104

Tabel 4.5	Pasangan calon yang dikenal masyarakat	105
Tabel 4.6	Pendidikan yang diikuti responden	106
Tabel 4.7	Jenis Pekerjaan Responden	106
Tabel 4.8	Pendapatan Responden	107
Tabel 4.9	Kegiatan Sosial Yang Diikuti Oleh Responden	108
Tabel 4.10	Peran Responden dalam Kampanye Pilkada	110
Tabel 4.11	Status Responden Dalam Kampanye Pilkada	110
Tabel 4.12	Peran Responden dalam persiapan pelaksanaan Pilkada	111
Tabel 4.13	Keikutsertaan Responden dalam Pilkades	113
Tabel 4.14	Peran Responden dalam kegiatan rapat Rembug Dusun/Desa	114
Tabel 4.15	Kegiatan Rapat yang dihadiri Responden	114
Tabel 4.16	Frekuensi kehadiran responden dalam kegiatan rapat	115
Tabel 5.1	Pengenalan/pengetahuan terhadap pasangan calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pilkada di Temanggung	119
Tabel 5.2	Waktu pengenalan terhadap pasangan calon dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah	120
Tabel 5.3	Pendidikan dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah	123
Tabel 5.4	Pendapatan Dan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah	124
Tabel 5.5	Status Sosial ekonomi dan Partisipasi Politik dalam Pilkada	125
Tabel 5.6	Peran Kampanye dan partisipasi politik dalam Pilkada	127
Tabel 5.7	Keterlibatan dalam rapat desa/dusun/musrenbang	128
Tabel 5.8	Tingkat kehadiran dalam rapat dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Model Analisa	43
Gambar 1.2	Flow Chart : Twostage Random Sampling	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan chaos menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini .

Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan Kepala Daerah langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi. Dalam konteks penguatan demokratisasi, masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langkah awal menuju lajur demokrasi yang benar. Pembentukan warga negara yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan atau civil education. Aktualisasi dari civil education sebenarnya

terletak pada tingkat partisipasi politik rakyat di setiap momentum politik seperti pemilu. Seberapa jauh Pilkada selama ini memberi ruang partisipasi politik bagi rakyat? Apakah pilkada mampu menjadi titik persinggungan rakyat dan Negara sebagai manifestasi partisipasi politik rakyat?

Partisipasi politik rakyat tentu tak lepas dari kondisi atau sistem politik yang sedang berproses. Sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari orde baru sampai pada reformasi. Disadari bahwa reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis.

Seiring dengan konstelasi politik di era reformasi penguatan demokrasi yang legitimate sebagai harapan dari akhir transisi demokrasi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pelaksanaan Pemilu sejak tahun 2004 dan pilkada tahun 2005 secara langsung. Sebagai konsekuensi logis perubahan atmosfer politik tersebut maka dinamika dan intensitas artikulasi politikpun makin tampak di tengah ranah kehidupan sosial politik. Setidaknya masyarakat diterpa wacana dan partisipasi politik tidak hanya lima tahun sekali saat Pemilu saja. Tetapi juga, disemarakkan oleh Pemilu Kepala Daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebagai proses dari transformasi politik, makna pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme *check and balances* di antara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat mengharapkan pula agar pilkada dapat

menghasilkan kepala daerah yang akuntabel, berkualitas, *legitimate*, dan peka terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ini negara memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat dan martabat rakyat daerah. Masyarakat daerah yang selama ini hanya sebagai penonton proses politik pemilihan yang dipilih oleh DPRD, kini masyarakat menjadi pelaku atau *voter* (pemilih) yang akan menentukan terpilihnya Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

Sistem Pemilu Kepala Daerah secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, *floating mass* (massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi. Dapat dikatakan pilkada merupakan momentum yang cukup tepat munculnya berbagai varian preferensi pemilih yang menjadi faktor dominan dalam melakukan tindakan atau perilaku politiknya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung untuk Jawa Tengah telah selesai dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota yang dimulai pada bulan Juni 2005 merupakan pengalaman pertama bagi rakyat dalam menjalankan suksesi kepemimpinan di daerah.

Aspek penting yang menjadi fenomena demokrasi dalam pilkada secara umum di Indonesia adalah banyaknya kepala daerah terpilih yang hanya meraup suara di bawah 70%¹. Fenomena tersebut, tidak dapat dibaca sekadar hitam putih. Kasus pilkada Kabupaten Pati misalnya membuktikan telah terjadi "tsunami" politik yang menyebabkan pemilih banyak yang tidak datang ke TPS dan sengaja menghindar. Bahkan ada 1 TPS dengan jumlah pemilih sebesar 502, tetapi yang datang ke TPS tersebut dan mencoblos surat suara hanya 1 orang saja. Hal ini terlihat dari penelitian Achmad (2006)².

Pelaksanaan Pilkada di Temanggung yang dilaksanakan bersamaan dengan Pilgub Jateng pada 22 Juni 2008, informasi data dari KPU Kabupaten Temanggung diperoleh data yang menyebutkan jumlah daftar pemilih tetap dalam Pilgub maupun Pilbup 22 Juni 2008 sebanyak 555.032. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya dalam pilgub mencapai 110.398 (19,89%) Sedang dalam Pemilihan Bupati hanya 105.284 (18,97%) sehingga hanya terpaut 0,92%. Perolehan suara sebesar 81,03% merupakan suatu fenomena dimana untuk daerah-daerah di Jawa Tengah maupun diseluruh Indonesia perolehan suara terus menurun. Untuk wilayah Jawa Tengah menurut data yang diperoleh dari KPU Jateng, Kabupaten Temanggung menempati urutan kedua tingginya perolehan suara. Walaupun bila dibanding pada saat Pemilihan Presiden 2004, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgub dan Pilbup tahun 2008 cenderung menurun. Pasalnya dari daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2004 sebanyak 518.941 orang

¹ Harian Kompas, Rabu 9 Agustus 2006, "Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada".

² Surandim Achmad, "Perilaku Memilih Masyarakat Pedesaan dalam Pilkada langsung di Kabupaten Pati (Studi Kasus Pilkada Langsung di Desa Karaban dan Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, Tanggal 24 Juli 2006), Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan), hal 4

pemilih, yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 74.735 (14,40%). Namun prosentase penurunan hak pilihnya hanya terpaut sedikit. Adapun hasil perhitungan suara Pemilihan Presiden tahun 2004 di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hasil Penghitungan Suara Pilpres Tahun 2004
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Rekapitulasi jumlah pemilih		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT	219.699	221.836	441.535
2.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan DPT	38.441	36.294	74.735
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain	1.565	1.106	2.671
4.	Jumlah Pemilih terdaftar (1+2+3)	259.705	259.236	518.941

Sumber: KPUD Kabupaten Temanggung, 2008

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 441.535 (86,50%) hal ini menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati Temanggung urutan pertama diraih pasangan Hasyim-Budiarto 145.323 disusul Bambang Sukarno-Fuad Hidayat 138.300 dan pasangan Irfan-Setyoaji 130.378 suara. Adapun perhitungan suara untuk Pemilihan Bupati Temanggung tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

**Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Temanggung Tanggal 22 Juni 2008**

No	Partai	No Urut	PASANGAN CALON	LATAR BELAKANG	%	JUMLAH PEROLEHAN
1.	P.GOLKAR dan PAN	1	Drs. H. HASYIM AFANDI	Mantan Bupati Kab. Magelang	35,10	145.323
			Ir. H. BUDIARTO, MT	Ka. Dinas Perhubungan (PNS)		
2.	PDI -P dan PKB	2	Drs. H.M. BAMBANG SUKARNO	Ketua DPRD Kab. Temanggung	33,41	138.300
			FUAD HIDAYAT, S.Sos	Ketua DPC PKB Kab. Temanggung		
3.	PPP, PKS, Demokrat, PBB	3	Drs. H. MUKHAMAD IRFAN	Bupati Kab. Temanggung	31,5	130.378
			Drs. M. SETYO ADJI, MM	Sekda Kab. Temanggung (PNS)		
			JUMLAH PEMILIH			555.032
			JUMLAH PEMILIH YG MENGG HAK PILIH			449.748 (81%)
			JUMLAH SUARA SAH			414.001
			JUMLAH SUARA TIDAK SAH			35.747

Sumber : KPUD Kabupaten Temanggung

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pasangan calon yang meraih suara terbanyak adalah Hasyim-Budiarto. Pasangan Hasyim-Budiarto menang tipis dari kedua pasangan lainnya. Hal yang menarik, ketatnya persaingan masing-masing kandidat dapat dilihat dari perolehan suara yang hanya terpaut sedikit.

Demokrasi tidak sekedar persoalan menang kalah, karena di dalam demokrasi yang juga penting adalah bagaimana memainkan peran dalam mengakomodasi konflik dan kepentingan selain menciptakan struktur relasi kepentingan yang saling memaknai. Perbedaan dasar pilkada langsung dengan

tatanan politik perwakilan sebelumnya adalah tidak jelasnya statistik kehendak politik rakyat atas sosok kepala daerah yang akan memimpinnya. Dalam tatanan politik lama, keterwakilan masyarakat tidak dapat diukur persatu orang anggota DPRD, tetapi dalam pemilihan langsung keterwakilan masyarakat secara statistik dapat diketahui secara konkret berdasarkan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.

Demikian pula banyak harapan terhadap pilkada langsung bisa menumbuhkan antusiasme politik rakyat yang diwujudkan dengan tingginya partisipasi politik. Namun realitasnya dalam beberapa pilkada di Jawa Tengah menunjukkan bahwa kecenderungan golput semakin meningkat. Fenomena tingginya angka golput tersebut terutama di Jawa Tengah dapat dimaknai sebagai refleksi kebosanan rakyat terhadap politik, atau tidak adanya calon yang cukup menarik dan berkualitas yang diajukan oleh partai politik, sehingga tidak memberi harapan bagi “perubahan”³. Namun unikny, ditengah kecenderungan angka golput yang semakin meningkat khususnya di wilayah Jateng, hal ini ternyata tidak terjadi di Kabupaten Temanggung. Kondisi tersebut tentu saja merupakan fenomena unik pilkada di Jawa Tengah karena dimana tingkat partisipasi yang tinggi di tengah makin rendahnya partisipasi pemilih. Menurut Data KPU Jawa Tengah bahwa sampai saat ini Temanggung merupakan daerah yang memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tertinggi setelah Kabupaten Rembang. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

³ Harian Suara Merdeka, Senin, 23 Juni 2008, ”Golput Pilkada Jateng Dominan”.

Tabel 1.3

**Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Di 35 Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah**

No	Kab/Kota	Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu/Pilkada			
		2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab Cilacap			67,84	
2	Kab. Banyumas				72,96
3	Kab. Purbalingga	73,12			
4	Kab. banjarnegara		72,97		
5	Kab. Kebumen	71,81			
6	Kab. Purworejo	74,96			
7	Kab. Wonosobo	79,20			
8	Kab. Magelang				72,48
9	Kab. Boyolali	76,68			
10	Kab. Klaten	74,53			
11	Kab. Sukoharjo	72,45			
12	Kab. Wonogiri	68,96			
13	Kab. Karanganyar				68,94
14	Kab. Sragen		71,63		
15	Kab. Grobogan		69,92		
16	Kab. Blora	74,25			
17	Kab. Rembang	82,42			
18	Kab. Pati		51,78		
19	Kab. Kudus				56,44
20	Kab. Jepara			55,07	
21	Kab. Demak		77,64		
22	Kab. Semarang	66,99			
23	Kab. Temanggung				81,03
24	Kab. Kendal	73,35			
25	Kab. Batang		77,66		
26	Kab. Pekalongan		74,02		
27	Kab. Pemalang	64,94			
28	Kab. Tegal				57,20
29	Kab. Brebes			55,07	

1	2	3	4	5	6
30	Kota Magelang	77,20			
31	Kota Surakarta	74,91			
32	Kota Salatiga		76,58		
33	Kota Semarang	66,51			
34	Kota Pekalongan	67,95			
35	Kota Tegal				65,81

Sumber data : Diolah dari KPU Jateng

Dari tabel 1.3 dapat diketahui bahwa dari 35 Kabupaten/Kota yang telah mengadakan pilkada, partisipasi pemilih untuk pilkada Temanggung menunjukkan angka yang tinggi sebesar 81,03%. Kondisi inilah yang menyebabkan penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008”**. Pembahasan masalah ini merupakan tinjauan deskriptif analisis tentang peran serta masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Temanggung yang merupakan tempat penyelenggaraan Pilkada. Pelaksanaan penelitian dilakukan setelah pelaksanaan pilkada yaitu pada bulan Oktober 2008.

B. PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

1. Perumusan Masalah

Pada hakekatnya masalah dalam suatu penelitian merupakan segala bentuk pernyataan yang perlu dicari jawabannya, atau segala bentuk kesulitan yang datang tentunya harus ada kegiatan yang memecahkannya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Adapun rumusan permasalahan yang penulis ajukan adalah:
Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Temanggung?

2. Pembatasan Masalah

Untuk kejelasan masalah serta memudahkan dalam pemecahannya, maka di perlukan adanya gambaran tentang apa yang akan di teliti dan bagaimana pembatasannya.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Temanggung ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat

2. Kegunaan Penelitian

Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi (kegunaan) dalam pengembangan keilmuan terutama yang berkaitan langsung dengan kegiatan sosial politik masyarakat atau kajian sosiologi politik. Kontribusi penelitian ini tidak hanya dalam memperkaya khasanah teori, tetapi hasil temuan yang diolah secara proporsional dan profesional, diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam merancang level kebijakan mengenai proses pemilihan kepala daerah.

D. KERANGKA TEORI

1. Defenisi konsep tentang partisipasi politik

Pada abad 14 hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan orang terpandang⁴. Kecenderungan kearah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa renaissance dan reformasi abad ke 15 sampai abad 17 dan abad 18 dan 19. Tetapi cara-cara bagaimana berbagai golongan masyarakat (pedagang, tukang, orang-orang profesional, buruh kota, wiraswasta industri, petani desa dan sebagainya), menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda di berbagai negara.⁵

Menurut Myron Weiner seperti dikutip oleh Mas'oed, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik.

1. Modernisasi

Ketika penduduk kota baru (yaitu buruh dan pedagang, kaum profesional) melakukan komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa, mereka merasa dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

⁴ Mas'oed, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, 2001, hlm. 45

⁵ *Ibid.*, hlm. 45

2. Pengaruh-pengaruh struktur kelas sosial

Begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

Kaum intelektual (sarjana, filosof, pengarang, wartawan) sering mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru.

4. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik

Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar "hak-hak" ini dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan

Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup pada kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Maka dari itu, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Istilah partisipasi seringkali digunakan untuk memberi kesan mengambil bagian dalam sebuah aktivitas. Mengambil bagian dalam sebuah aktivitas dapat mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut.

Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), ada keterlibatan secara emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Berikut ini adalah beberapa definisi partisipasi politik menurut para ahli juga disertai indikator-indikator partisipasi politik yang disajikan berupa tabel⁶

⁶ A.A. Said Gatara, dan Mohd. Dzulkiah Said, M.Si, "Sosiologi Politik" : Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, edisi 2007, hal. 90

Tabel 1.4

Beberapa Defenisi Partisipasi Politik

Sarjana	Defenisi	Indikator
Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson (1984:5)	Partisipasi politik...kegiatan warga preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> - Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan - Memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan publik - Dilakukan warga negara preman (biasa)
Michael Rush & Philip Althoff (2003: 23)	Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik	<ul style="list-style-type: none"> - berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik - memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi
Herbert Mc Closky (dalam Miriam, 1994: 183-184)	Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (<i>voluntary</i>) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.	<ul style="list-style-type: none"> - warga Negara terlibat dalam proses proses politik
Kevin R. Hardwic (dalam Frank N. Magill, 1996)	Partisipasi politik memberi perhatian cara-cara warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat public agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat interaksi antara warga Negara dengan pemerintah - Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat public.
Miriam Budiarto (1994: 183)	Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yakni dengan cara memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (<i>public policy</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Berupa kegiatan individu atau kelompok - Bertujuan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan public.
Ramlan Surbakti (1992: 140-1410)	Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. sesuai dengan istilah partisipasi, (politik) berarti keikutsertaan warga negaraa biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.	<ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan warga Negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public - Dilakukan oleh warga Negara biasa.

Sumber : Sosiologi Politik; Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian

Berdasarkan pendapat para ahli pada tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Selanjutnya untuk menjaga salah pengertian dalam penelitian di perlukan adanya suatu penjelasan istilah atau defenisi konsep. Tesis ini berjudul **：“Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008”**.

1. Partisipasi politik adalah hak suara masyarakat digunakan dengan baik dan berperan serta dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
2. Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang tinggal bersama untuk mencapai tujuan bersama
3. Pemilihan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memilih.
4. Kepala Daerah artinya orang dipilih untuk memimpin melalui pemilihan.
5. Langsung artinya dilaksanakan sendiri tanpa diwakilkan oleh orang lain.

Setiap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah penyelenggaranya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana tercantum di dalam Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB IV bagian kedelapan pasal 57 (1,2) (2004:52) yang berbunyi :

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bahwa pemilihan kepala daerah benar-benar bersifat murni dan konsekuen dimana setiap pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik. Harapan positif dari partai politik adalah optimalisasi fungsi dan peran partai politik itu sendiri dalam membawa masyarakat menuju kearah yang lebih baik dan sejahtera serta demokratis.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih oleh masyarakat memberikan corak atau warna tersendiri terhadap pemerintahan yang akan terbentuk, apalagi diberlakukannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 139, dimana dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai kewenangan untuk memilih Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota /Wakil Walikota.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan pranata terpenting dalam tiap Negara demokrasi, terlebih lagi bagi Negara yang berbentuk republik seperti Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

A. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Secara teoritis dapat dijelaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah suatu sistem yang memiliki paling tidak 3 ciri. Ciri-ciri tersebut adalah (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling bergantung; (3) mempunyai perbatasan (boundaries) yang memisahkannya dari lingkungan yang terdiri dari sistem-sistem lain⁷.

Sistem pilkada langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder atau sub-sub sistem. Bagian tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*. Mekanisme, prosedur dan tata cara dalam pilkada langsung merupakan dimensi *electoral regulation*, yaitu segala ketentuan atau aturan mengenai pilkada langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon pemilih dan menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Secara teknis parameter mekanisme, prosedur dan tata cara dalam sisten adalah terukur (*measurable*). Sistem pilkada langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan proses untuk memilih kepala daerah⁸.

Secara praktis, pilkada merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang nilainya *equivalen* dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalensi tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD. Pelaku utama sistem pilkada adalah rakyat, partai politik, dan calon kepala daerah. Ketiga pelaku tersebut terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

⁷ Easton dalam Prihatmoko, 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, hal. 200

⁸ *Ibid.*, hal. 202

(1) pendaftaran pemilih; (2) pendaftaran calon; (3) penetapan calon; (4) kampanye; (5) pemungutan dan penghitungan suara; dan (6) penetapan calon terpilih.

B. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Pilkada berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 dikatakan memenuhi syarat sebagai pilkada langsung karena adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan memberikan peluang kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara, dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan⁹.

Adapun kegiatan pilkada langsung dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yakni masa persiapan dan masa pelaksanaan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 65 ayat (1)¹⁰. Pada ayat (2) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan adalah:

1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pilkada
4. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS.
5. Pembentukan dan pendaftaran pemantau.

⁹ Prihatmoko, *op.cit*, hal. 210

¹⁰ UU Nomor 32 Tahun 2004

Dalam kegiatan masa persiapan, partisipasi masyarakat sangat menonjol dalam pembentukan Panitia Pengawas (Panwas), PPK, PPS, dan KPPS. Tahapan pelaksanaan terdiri dari 6 (enam) kegiatan sesuai pasal 65 ayat (3)¹¹, yaitu:”

1. Penetapan daftar pemilih
2. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah
3. Kampanye
4. Pemungutan suara
5. Penghitungan suara
6. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

C. Kampanye Pilkada

Kampanye lebih merupakan suatu ajang manuver politik untuk menarik sebanyak mungkin pemilih dalam pemilu sehingga bisa meraih kekuasaan. Untuk itu segala cara mungkin dipakai, diantaranya janji-janji yang muluk dan acapkali tidak masuk akal. Kampanye kerap kali sekadar basa-basi politik. Rakyat secara umum bersifat apatis atau *sumonggo kerso* yang penting aman. Kampanye yang merupakan bagian dari marketing politikpun dirasa perlu oleh partai-partai politik menjelang pemilu. Setelah pemilu selesai dan kekuasaan diperoleh, mereka melupakan segala janji. Yang penting sudah berkuasa, lalu bertindak semau mereka sendiri.

Ketidakpercayaan terhadap partai politik semakin kental. Sikap apatis tadi semakin pekat. Orang semakin tak percaya pada politik, sehingga banyak

¹¹ *Ibid*

kalangan skeptik yang cukup kritis akhirnya mengambil sikap golput. Menurut masyarakat kelas bawah politik tidak ubahnya pertempuran elite masyarakat dan tidak merubah apapun kondisi yang ada. Pemilu disosialisasikan dengan perebutan dan pembagian kekuasaan ketimbang proses dialogis antara kandidat dan pemilih¹².

Kampanye sebagai suatu proses 'jangka pendek', dimana semakin kuat anggapan tentang tidak relevannya intensitas para kandidat dalam memperkenalkan ide dan gagasan politik yang dimaksudkan untuk sekedar menarik perhatian serta dukungan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menilai kandidat dari janji dan harapan yang diberikan selama periode kampanye pendek saja. Cara masyarakat mengevaluasi kandidat juga dipengaruhi oleh kredibilitas dan reputasi politiknya dimasa lalu. Setiap keputusan dan perilaku politik akan terekam dalam memori kolektif masyarakat dan inilah yang membentuk persepsi masyarakat mengenai kualitas kandidat. Setiap janji dan harapan yang disampaikan selama periode kampanye akan dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan, apakah terdapat kesesuaian atau tidak.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kampanye politik selama ini hanya dilihat sebagai suatu proses interaksi intensif dari partai politik kepada publik dalam kurun waktu tertentu menjelang pemilu. Dalam defenisi ini, kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada semua kontestan, baik partai politik atau perorangan, untuk memaparkan program

¹² Firmansyah, Marketing Politik (antara pemahaman dan realitas), Yayasan Obor, Jakarta, 2007, hlm. 268

kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan. Kampanye dalam kaitan ini dilihat sebagai suatu aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan atribut partai (misalnya umbul-umbul, poster, spanduk) dan pengiklanan partai. Periode waktu sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kampanye jangka pendek ini dicirikan dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing kontestan, ketidakpastian hasil dan pengerahan semua bentuk usaha untuk menggiring pemilih ke bilik-bilik pencoblosan serta memberikan suara kepada mereka¹³. Banyak kalangan yang hanya mengartikan kampanye politik sebagai kampanye pemilu. Pemahaman sempit tentang kampanye politik ini membuat semua partai politik dan kontestan individu memfokuskan diri pada kampanye pemilu belaka (dimana rentang waktunya sangat terbatas). Semua usaha, pendanaan, perhatian dan energi dipusatkan untuk mempengaruhi dan memobilisasi pemilih menjelang pemilu. Setelah pemilu usai, aktivitas politik dilupakan. Para kandidat hanya melihat bahwa aktivitas politik adalah aktivitas untuk mencoblos, lalu terjadi pengabaian terhadap keberpihakan serta semangat dalam membantu permasalahan bangsa dan negara pasca pemilu. Padahal masyarakat dalam mengevaluasi kualitas kandidat juga melihat apa saja yang dilakukan dimasa lalu. Pengamatan masyarakat tercurah pada semua aktivitas partai dan kandidat individu, bukannya dipusatkan pada kampanye

¹³ *Ibid.*, hal 277

pemilu saja. Melihat kampanye pemilu sebagai kampanye politik sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya.

Terdapat ketidaksepakatan tentang pengaruh kampanye pemilu terhadap perilaku pencoblosan (*voting behaviour*). Beberapa studi yang dilakukan menunjukkan bahwa kampanye pemilu melalui aktivitas pengiklanan dan debat publik di televisi meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian yang dilakukan oleh Huckfeldt *et al.*, menunjukkan bahwa kampanye pemilu meningkatkan keterjangkauan, kepastian dan akurasi pesan politik yang disampaikan kontestan kepada pemilih. Sementara studi-studi yang lain menunjukkan hasil yang berbeda. Kampanye pemilu diungkapkan hanya berdampak kecil, kalau tidak mau dibilang tidak berdampak, terhadap perilaku pemilih. Gelman dan King dan Bartels (1993) sebagaimana yang dikutip dari Firmansyah menunjukkan bahwa preferensi pemilih terhadap kontestan telah ada jauh-jauh hari sebelum kampanye pemilu dimulai. Sehingga siapa yang akan memenangkan pemilu dapat dengan mudah ditentukan sebelum pemilu dilaksanakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat melihat layak atau tidaknya suatu kandidat tidak hanya terbatas pada kampanye pemilu, melainkan berdasarkan reputasi masa lalu pula.

Tabel 1.5

Kampanye Pemilu dan Kampanye Politik

	Kampanye Pemilu	Kampanye Politik
Jangka dan batas waktu	Periodik dan tertentu	Jangka panjang dan terus menerus
Tujuan	Menggiring pemilih kebelik suara	<i>Image</i> politik
Straategi	Memobilisasi daan berburu pendukung <i>Push- Marketing</i>	membangun dan membentuk reputasi politik <i>Pull Marketing</i>
Komunikasi Politik	Satu arah dan penekanan kepada janji dan haraapan politik kalau menang pemilu	Interaksi dan mencari pemahaman beserta solusi yang dihadapi masyarakat
Sifat hubungan antara kandidat dan pemilih	Pragmatis/transaksi	Hubungan relasional
Produk politik	Janji dan harapan politik Figur kandidat dan program kerja	Pengungkapan masalah dan solusi. Ideologi dan sistem nilai yang melandasi tujuan partai
Sifat program kerja	<i>Market oriented</i> dan berubah ubah setiap pemilu	Konsisten dengan sistem nilai partai
Retensi memori kolektif	Cenderung mudah hilang	Tidak mudah hilang dalam ingatan kolektif
Sifat kampanye	Jelas, terukur dan dapat dirasakan langsung aktivitas fisiknya	Bersifat laten, bersikap kritis dan bersifat menarik simpati masyarakat

Sumber : Firmansyah, 2007 dalam buku Marketing Politik (Antara pemahaman dan realitas)

Pada pilkada Temanggung masing-masing kandidat melakukan kampanye pada masyarakat, walaupun pada dasarnya mereka adalah wajah-wajah lama yang telah dikenal sebagian besar masyarakat, namun kampanye tetap dianggap penting guna merangsang aktivitas politik masyarakat. Hal ini juga telah diatur secara rinci dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Masing-masing pasangan calon punya cara sendiri-sendiri guna menarik simpati masyarakat. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menarik dukungan massa untuk memilih mereka pada saat pemungutan suara. Kegiatan Kampanye ketiga pasangan calon harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPUD Temanggung. Kegiatan kampanye masing-masing pasangan calon harus dilaporkan secara rinci kepada KPUD Temanggung guna

mengantisipasi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kampanye.

2. Telaah pustaka tentang partisipasi politik

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum adalah pemungutan suara atau dikenal dengan istilah voting, entah itu untuk memilih calon para wakil rakyat, entah untuk memilih wakil negara. Dalam buku Pengantar Sosiologi Politik¹⁴, mengidentifikasikan bentuk-bentuk partisipasi politik yang mungkin sebagai berikut :

- Menduduki jabatan politik atau administratif,
- Mencari jabatan politik / administratif,
- Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik,
- Menjadi anggota pasif organisasi politik,
- Menjadi anggota aktif organisasi semi-politik (quasi-political),
- Menjadi anggota pasif organisasi semi-politik,
- Menjadi partisipan dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya,
- Menjadi partisipan dalam diskusi politik informal,
- Menjadi partisipan dalam pemungutan suara (voting)

Hierarki partisipasi politik tersebut berlaku di berbagai tipe sistem politik, tetapi arti masing-masing tingkat tersebut bisa berbeda dari sistem yang satu ke sistem politik yang lain. Selain itu, Rush dan Althoff juga mengingatkan bahwa partisipasi pada suatu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi.

¹⁴ Rush Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Rajawali Press, 2003, hal. 122

Untuk menganalisis tingkatan-tingkatan yang berpartisipasi politik, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson ¹⁵ mengajukan dua kriteria penjas.

1. Dilihat dari dua lingkup atau proporsi dari satu kategori warga Negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.
2. Intensitas, ukuran, jangka waktu, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.

Hubungan antara kedua kriteria ini cenderung diwujudkan dalam hubungan “berbanding terbalik”. Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau yang rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya, jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, intensitasnya semakin tinggi, misalnya kegiatan para aktivis parpol, pejabat parpol, kelompok penekan. Jadi, terjadi hubungan, “semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, semakin rendah atau kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi.”¹⁶

Dalam bentuk “*episodic*” Milbarth membuat pemetaan yang tampaknya masih relevan untuk kondisi sekarang. Rinciannya mengandung empat dimensi yang hierarkhis sifatnya seperti tampak pada tabel berikut:

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 93

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 95

Tabel 1.6

Bentuk Partisipasi Politik Versi Milbarth

Kegiatan-kegiatan sebagai Gladiator (<i>Gladiator Activities</i>)	<ul style="list-style-type: none">- <i>Holding Public and party office</i>- <i>Being A Candidate for office</i>- <i>Attending a caucus or a strategy meeting</i>- <i>Becoming an active member in political party</i>- <i>Contributing time in a political campaign</i>
Kegiatan-kegiatan transisi (<i>Transition Activities</i>)	<ul style="list-style-type: none">- <i>Attending a political meeting or rally</i>- <i>Making a monetary contribution to party or candidate</i>- <i>Contacting a public official or a political leader</i>
Kegiatan-kegiatan sebagai penonton (<i>Spectator Activities</i>)	<ul style="list-style-type: none">- <i>Wearing a button or putting a sticker on one's car</i>- <i>Attempting to talk another into voting a certain way</i>- <i>Initiating a political discussion</i>- <i>Voting</i>- <i>Exposing oneself to political stimuli</i>
Apatis (<i>Apathetic</i>)	

Klasifikasi partisipasi versi Milbarth tersebut menggunakan analog permainan gulat di zaman Roma yang terkenal, yakni gladiator. Sebelumnya, ada tiga peran penting dalam permainan itu, yakni:

1. yang bermain (*gladiator*)
2. yang menonton (*spectator*)
3. transisi yang menuju ke tingkat tertinggi (*transition*)

Bagian terendah adalah mereka yang apatis. Mereka sebetulnya tidak termasuk dalam piramida karena tidak mengikuti permainan tersebut. Namun

demikian agak sulit mengabaikan bentuk ini mengingat dalam realitas politik, kelompok itu memang eksis dan terkadang membawa pengaruh politik.

Partisipasi politik dapat terwujud dalam pelbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku seperti berikut¹⁷:

- (a) Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- (b) Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- (c) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan eksplisitnya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah
- (d) Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

¹⁷ Samuel Huntington, Joan Nelson, "Partisipasi politik di Negara berkembang", Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 17

- (e) Tindakan kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk didefinisikan sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Menurut Frank Lindenfeld dalam Moran bahwa faktor utama yang mendorong seseorang berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya ditemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik. Dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemapanan ekonomi.

Sedangkan Milbrath menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain :

- Sejauh mana orang menerima perangsang politik.

Karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh karena sering mengikuti diskusi politik melalui mass media atau melalui diskusi formal.

- Faktor karakteristik pribadi seseorang.

Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya hankamrata, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.

- Karakteristik sosial seseorang.

Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.

- Keadaan politik.

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Seseorang yang tiada mempunyai pengetahuan atas informasi mengenai suatu masalah politik atau situasi politik mungkin merasa kurang kompeten untuk berpartisipasi dalam sesuatu usaha guna memecahkan masalahnya, atau untuk mengubah situasinya, maka kompetensi politiknya meningkat dengan bertambahnya pengetahuan. Kepribadian yang ramah, suka bergaul, dominan dan memiliki jiwa sosial yang tinggi akan lebih condong melakukan kegiatan politik.

S.M Lipset dalam studinya tidaklah teramat sulit mengemukakan tingkah laku politik individu pada umumnya, dan partisipasi politik pada khususnya.

Dengan mempergunakan sederet studi dan data, telah memberikan uraian tentang berbagai aspek perilaku elektoral, termasuk di dalamnya hasil jumlah yang turut memberikan suara, petunjuk mengenai voting dan dukungan bagi gerakan-gerakan ekstrimis.

Demikian pula studi voting yang mendalam di beberapa negara memberikan bukti yang kuat untuk mendukung satu jajaran luas dari hipotesa-hipotesa. Lebih khusus mengenai asosiasi antara status sosio-ekonomis dengan tingkah laku elektoral yang telah didokumentasikan secara luas dan banyak sekali perhatian telah dicurahkan pada individu yang menyimpang dari norma voting kelas.

Studi ini mengemukakan, bahwa perilaku politik seseorang itu ditentukan oleh interaksi dari sikap sosial dan sikap politik individu yang mendasar. Asosiasi antara berbagai karakteristik pribadi dan sosial seseorang (seperti status sosio-ekonomis) dan tingkah laku politik adalah hasil dari motivasi sadar atau tidak sadar, atau kombinasi dari keduanya. Betapapun juga asosiasi ini tidak menyajikan penjelasan, juga tidak meletakkan suatu hubungan sebab-akibat, walaupun asosiasi lebih rendah berasosiasi dengan partai kiri, dan golongan yang berstatus lebih tinggi berasosiasi dengan partai kanan, tidaklah mengherankan.

Robert Lane dalam studinya tentang keterlibatan politik, mempersoalkan bahwa partisipasi politik memenuhi empat macam fungsi, antara lain :

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi,
2. Sebagai sarana memuaskan kebutuhan penyesuaian sosial,
3. Sebagai sarana mengejar nilai-nilai khusus,
4. Sebagai sarana memenuhi kebutuhan psikologis tertentu.

Rudolf Herbele mengemukakan adanya empat masalah yang menyulitkan studi mengenai motif yang mendorong tingkah laku sosial dan perilaku politik. Pertama, motif yang sebenarnya sengaja disembunyikan oleh individu, dan si pengamat secara konsekuen disesatkan oleh hal-hal yang tampak sebagai informasi yang cermat. Kedua, motif yang sesungguhnya mungkin tidak jelas bagi individu, dan mungkin dia merasionalisir tindakan sendiri sebelumnya, sesudah atau selama berlangsungnya peristiwa. Ketiga, motif yang sebenarnya mungkin tidak jelas, tidak hanya bagi individu yang tindakannya tengah diselidiki akan tetapi juga bagi orang lain yang telah dipengaruhi tindakan-tindakannya. Akhirnya, motif itu tanpa kecuali selalu kompleks dan sulit diukur secara cermat.

Kesulitan dalam meneliti motivasi itu tentunya tidak menutup usaha untuk menganalisa kemungkinan adanya beberapa motif yang beraksi. Weber mengemukakan 4 tipe motif :

1. Yang rasional bernilai, didasarkan atas penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok.
2. Yang afektual emosional, didasarkan atas kebencian terhadap sesuatu ide, organisasi atau individu.
3. Yang tradisional, didasarkan atas penerimaan norma, tingkah laku individu dari suatu kelompok sosial.
4. Yang rasional bertujuan, didasarkan atas keuntungan pribadi.

Pada hakekatnya, terdapat kesamaan dasar antara tipologi motivasi dari Weber dengan fungsi partisipasi politik dari Lane. Jika Weber dan Lane benar,

maka partisipasi politik itu ditentukan oleh sikap-sikap sosial dan sikap-sikap politik individu yang mendasar, yang erat berasosiasi baik dengan karakteristik pribadi dan sosialnya, maupun dengan lingkungan sosial dan lingkungan politik yang membentuk konteks perilaku politiknya. Karena lingkungan sosial dan lingkungan politik ini berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, maka partisipasi politik berbeda-beda dari satu sistem politik dengan sistem politik lainnya.

Individu memperoleh orientasi politik dan pola tingkah-laku politiknya melalui proses sosialisasi politik, dan pengalamannya mengenai gejala sosial dan politik melalui berbagai tingkatan dan tipe partisipasi politik (atau melalui ketidakikutsertaanya dalam partisipasi sedemikian itu), merupakan bagian dari proses sosialisasi yang berkesinambungan, serta merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi partisipasinya di kemudian hari.

Selanjutnya, individu itu jelas tidak dihadapkan pada gejala sosial dan politik yang tidak berubah, karena peristiwa tadi mengalami perubahan dalam hal permasalahan personal dan waktu sampai pada keunikan dari suatu peristiwa politik tertentu.

Masih berkaitan dengan partisipasi rutin, Barnes dan Kaase¹⁸ melakukan rincian sedikit berbeda. Mereka melihat partisipasi rutin dalam konteks pemilu dan politik sehari-hari dalam bentuk berikut:

1. Memapari dirinya sendiri dengan artikel pemilu dan politik
2. Mendiskusikan pemilu dan politik

¹⁸ *Ibid* hal 97

3. Menjadi *opinion leader*.
4. Menggunakan simbol-simbol partai
5. Menghadiri pertemuan politik

Faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studi Milbarth ditemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik. Orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis, hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemapanan ekonomi.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa individu yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan yang lebih bergengsi umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah dan pekerja kasar. Ketiga komponen di atas terangkum dalam variabel status sosial ekonomi. Kesimpulannya, status sosial ekonomi mempengaruhi partisipasi politik secara positif.¹⁹

Beberapa studi juga menemukan bahwa masing-masing komponen status sosial ekonomi merupakan variabel independent yang mempengaruhi partisipasi politik secara berbeda. Pendidikan adalah variabel terpenting yang mempengaruhi partisipasi politik, dua individu yang mempunyai tingkat pendapatan sama memiliki tingkat partisipasi yang berbeda jika tingkat pendidikannya berbeda.²⁰

Didalam suatu masyarakat, tingkat partisipasi politik cenderung bervariasi dengan status sosio ekonomi. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi,

¹⁹ M. Margaret Conway, *Political Participation in the United States*, Congressional Quarterly Inc., Washington DC, 1985, hlm. 19-24

²⁰ *Ibid.*, hlm. 20

berpenghasilan lebih besar dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif daripada mereka yang miskin, tak berpendidikan dan memiliki pekerjaan status rendah. Orang-orang yang berstatus lebih tinggi khususnya yang berpendidikan lebih tinggi, lebih besar kemungkinannya untuk merasa bahwa adalah kewajiban seorang warganegara untuk berpartisipasi dalam politik.

Di India, data polling dari 1961, 1964 dan 1967 menunjukkan bahwa orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi mempunyai perhatian yang lebih besar dalam politik, lebih sering membahas sosial politik, dan lebih banyak berusaha untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat pemerintah, artinya mereka lebih sering melibatkan diri dalam kegiatan mengadakan kontak atau lobbying. Akan tetapi poll-poll itu juga menunjukkan bahwa orang-orang yang berpendidikan tinggi kurang berminat untuk melibatkan diri dalam kegiatan pemilihan, termasuk memberikan suara, menghadiri rapat-rapat politik, dan menyumbang uang dalam kampanye politik. Tingkat-tingkat partisipasi pemilihan yang paling tinggi terdapat dikalangan orang-orang yang buta huruf, lalu orang-orang yang berpendidikan menengah, sedangkan orang-orang yang berpendidikan tinggi menunjukkan tingkat-tingkat partisipasi yang paling rendah. Di dalam ketiga bentuk kegiatan pemilihan itu, partisipasi orang-orang yang berpendidikan tinggi lebih rendah dibandingkan orang-orang yang buta huruf.

Beberapa penjelasan dikemukakan. Pertama, untuk memberikan suara diperlukan waktu dan upaya, dan orang-orang yang berpendidikan lebih baik

kurang berminat untuk menyediakan waktu dan upaya itu, dibandingkan dengan orang-orang yang berpendidikan rendah, yang mungkin menganggap hari pemungutan suara itu sebagai hari pesta. Kedua, tekanan-tekanan kelompok, penyuapan-penyuapan dapat menghasilkan banyak partisipasi yang dimobilisasikan di dalam kegiatan-kegiatan pemilihan oleh mereka yang kurang berpendidikan, sementara efeknya tidak sama terhadap mereka yang berpendidikan lebih baik²¹.

Dari beberapa pilkada yang telah dilaksanakan di Jawa Tengah, ada beberapa faktor yang dapat membuat partai atau koalisi partai memenangkan pemilihan kepala daerah. Pertama, faktor partai dan koalisi partai yang mengusung calon kepala daerah (*image* dan *track record*). Dengan melihat bahwa komposisi atau koalisi partai pengusung calon memang merupakan partai-partai yang pada pemilu 2004 menunjukkan keunggulannya dalam perolehan suara. Partai-partai tersebut biasanya juga merupakan partai besar yang sudah “dikenal” masyarakat. Kedua, faktor figur calon kepala daerah yang diusung partai (figuritas calon). Calon kepala daerah yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat (pemilih) dinilai mampu mendongkrak kemenangan partai dan pasangan calon dalam pilkada. Faktor ketokohan calon, *track record* calon dalam dunia politik, dan popularitas calon di mata masyarakat sangat menentukan. *Ketiga*, bergeraknya mesin partai politik. Partai politik yang mempunyai struktur dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa yang dapat bergerak untuk memenangkan calonnya dalam pilkada juga turut menjadi faktor penentu kemenangan. Mesin

²¹ Samuel Huntington, Joan Nelson, *op.cit.*, hlm. 112

politik yang digerakkan secara terorganisir dan tim kampanye yang solid terbukti mampu mendongkrak perolehan suara untuk memenangkan pilkada²².

Pada pilkada Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa masing-masing kandidat Bupati adalah "wajah-wajah lama" yang merupakan tokoh yang sudah tidak asing lagi dimata masyarakat Temanggung. Boleh dikata, ketiga calon adalah "wajah-wajah yang cukup populer". Ketiga calon Bupati, dimana diikuti oleh incumbent Drs.M. Irfan yang berpasangan dengan Drs. M. Setyo Adji, MM yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung adalah figur yang telah dikenal masyarakat. M. Irfan juga dikenal sebagai tokoh publik yang "agamis" yang sering mengadakan bimbingan rohani bagi masyarakat Temanggung. Sementara kandidat yang lain Hasyim Afandi yang berpasangan dengan Ir. Budiarto yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Hasyim Afandi merupakan tokoh masyarakat atau ulama yang sering mengadakan pengajian-pengajian di berbagai tempat di Temanggung. Beliau adalah juga merupakan Ketua MUI Temanggung dan pernah menjabat Bupati Magelang pada periode 1999-2004. Pasangan yang ketiga adalah Drs Bambang Sukarno-Fuad. Bambang Sukarno adalah Ketua DPRD Kabupaten Temanggung yang telah menjabat Ketua Dewan selama dua periode.

Bisa disimpulkan bahwa ketiga kandidat adalah sosok yang telah dikenal masyarakat, dan merupakan orang yang berpengalaman di pemerintahan. Kondisi ini juga memicu stimulus dari masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. Hasil perolehan suara juga menunjukkan tidak terdapat selisih suara yang signifikan

²² Disarikan dari Buletin Ayo Milih edisi 3, "Peta politik dan Pilkada 2008"

antara ketiga kandidat. Hasyim Afandi-Budiarto hanya menang tipis dari 2 kandidat lainnya.

Ini menunjukkan adanya persaingan yang cukup ketat antara ketiga kandidat. Ketiga pasangan calon ini juga mempunyai hubungan yang dekat dengan paguyuban pertembakauan di Temanggung. Sudah sejak lama Temanggung terkenal sebagai sentra tembakau di Jawa Tengah, sehingga hal ini juga membawa pengaruh terhadap situasi politik di Temanggung.

Pasangan Hasyim-Budiarto menang di tujuh kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Temanggung, yakni di Kecamatan Temanggung, Kranggan, Pringsurat, Parakan, Kedu, Bulu, dan Kecamatan Ngadirejo. Di Kecamatan Parakan dan Kedu pasangan yang diusung Partai Golkar ini menang mutlak dengan meraih 17.366 suara dan 13.450 suara. Sementara itu, pasangan Bambang-Fuad yang menempati urutan kedua dalam meraih suara juga unggul di tujuh kecamatan meliputi Tlogomulyo, Tembarak, Bansari, Kledung, Candiroto, Tretep, dan Wonoboyo Sedangkan pasangan Irfan-Adji hanya unggul di enam kecamatan, yakni Selopampang, Kaloran, Bejen, Jumo, Gemawang, dan Kandangan²³.

Kondisi masyarakat Temanggung yang agamis juga membawa pengaruh terhadap pilihan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kemenangan Hasyim Afandi-Budiarto. Hasyim yang merupakan ulama dan kiyai memang merupakan sosok yang dekat dengan masyarakat Temanggung. Pencalonan kembali Mukhamad Irfan sebagai incumbent ternyata tidak berhasil, bisa dilihat dari

²³ KPUD Kabupaten Temanggung, 2008

perolehan suara dimana M. Irfan memperoleh suara yang terendah dari 2 pasangan calon lainnya.

Situasi Temanggung pada era pemerintahan Totok-Irfan menimbulkan terjadinya peristiwa ontran-ontran di Temanggung dimana Bupati Totok Ary Prabowo akhirnya harus menanggung konsekuensi hukum dan politik dan sempat menimbulkan keresahan para staf dipemerintahan berimbas pada tidak menentunya situasi sosial ekonomi masyarakat. Ditambah lagi M. Irfan yang ditetapkan menjadi Bupati menggantikan Totok juga terkena dugaan kasus korupsi pada pengadaan Pasar Ngadirejo. Mantan Bupati Totok akhirnya divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Kabupaten Temanggung. Pada saat penelitian ini dilakukan Mukhamad Irfan meninggal dunia sehingga dugaan kasusnya tidak dilanjutkan.

Kasus ontran-ontran ini menyebabkan masyarakat Temanggung ingin melakukan pembaharuan melalui partisipasi politik. Ketika seorang politikus dianggap kurang memiliki kemampuan, masyarakat akan menjatuhkan vonis untuk tidak memilihnya²⁴. Yang mereka lihat adalah kemampuan partai atau kontestan individual maupun ideologi yang mereka usung.

Untuk mempelajari apa yang menjadi keinginan dari masyarakat, maka ada suatu langkah yang harus diperhatikan, yaitu faktor internal masyarakat yang meliputi kultur budaya dan tingkat intelektualitas yang kesemuanya akan memberikan rasionalitas strategi mobilisasi dalam upaya pewacanaan politik kepada masyarakat luas. Ketakutan akan demokrasi, khususnya pemilu, maka kita

²⁴ Firmanzah, *op.cit.*, hlm. 170.

dapat melihat melalui sejauh manakah pemerintahan sebelumnya mengakomodir segenap aspirasi dari masyarakat. Ketika publik menganggap ada semacam kegagalan strategi yang berujung pada kekecewaan publik, maka dapat dipastikan masyarakat akan melakukan penolakan secara parsial atas kebijakan tersebut. Upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik jika sudah terjadi kekecewaan tidaklah mudah.

Berdasarkan uraian di atas, variabel-variabel yang diduga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pilkada dalam penelitian ini adalah popularitas calon, status sosial ekonomi, dan kondisi sosial politik masyarakat.

E. VARIABEL-VARIABEL PARTISIPASI POLITIK dan MODEL ANALISA

1. Popularitas Calon

Popularitas calon merupakan satu hal yang sangat penting dalam suatu proses pemilihan. Adanya relevansi kepopulisan seorang calon terhadap akseptansi publik, maka kita mendapatkan kondisi sejauh manakah masyarakat mengenal dengan baik para calon yang ada. Ketika publik mengenal sosok dan kiprah seorang calon dengan baik, maka akan dapat dipastikan setengah dari kepercayaan telah terbangun, apalagi diikuti oleh pengalaman serta *track record* sang calon sehingga memberikan daya bius tersendiri kepada publik. Popularitas seorang calon selain dipengaruhi oleh *track record*, maka disana ternyata ada sebuah elemen vital yang ikut serta membangun atau mendongkrak kepopuleran seseorang. Faktor tersebut tak lain adalah visi misi yang selanjutnya dianggap

sebagai jargon kampanye²⁵. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejauh mana sinergisitas visi misi calon terhadap aspirasi masyarakat. Sang calon dapat melakukan studi konvergensi dengan menganalisa realita sosial yang berkembang di masyarakat. Dapat juga dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap calon, sampai sejauh mana hubungan antara calon dan masyarakat. Apakah masyarakat mengenal calon jauh sebelum masa kampanye atau hanya pada saat pencalonan saja. Jika calon-calon yang maju dalam pilkada adalah orang-orang yang telah dikenal oleh masyarakat maka akan timbul keinginan dari masyarakat untuk memenangkan calon yang telah dikenalnya yang sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu jika pelaksanaan pilkada sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat maka partisipasi masyarakat juga akan meningkat pula.

2. Status Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Biasanya status tersebut diukur melalui indeks yang merupakan kombinasi dari dua atau tiga komponen utama status sosial, yaitu pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.

Pendidikan adalah pemindahan pengetahuan atau nilai-nilai secara formal dan non formal. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jenis pekerjaan dalam penelitian ini diklasifikasi menjadi 2 yaitu pekerjaan utama dan sampingan. Sedangkan pendapatan adalah jumlah daya beli yang diperoleh seseorang secara teratur dalam jangka waktu tertentu.

²⁵ *Loc.cit.*, hlm. 268.

3. Kondisi Sosial Politik

Lingkungan sosial yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam beraktivitas politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

S.M Lipset²⁶ dalam studinya tidaklah teramat sulit mengemukakan tingkah laku politik individu pada umumnya, dan partisipasi politik pada khususnya. Dengan mempergunakan sederet studi dan data, telah memberikan uraian tentang berbagai aspek perilaku elektoral, termasuk di dalamnya hasil jumlah yang turut memberikan suara, petunjuk mengenai voting dan dukungan bagi gerakan-gerakan ekstrimis.

Studi ini mengemukakan, bahwa perilaku politik seseorang itu ditentukan oleh interaksi dari sikap sosial dan sikap politik individu yang mendasar. Asosiasi antara berbagai karakteristik pribadi dan sosial seseorang (seperti status sosio-ekonomis) dan tingkah laku politik adalah hasil dari motivasi sadar atau tidak sadar, atau kombinasi dari keduanya.

Bagaimanapun juga lingkungan sosial ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan

²⁶ Lipset, Seymour Martin, *Political Man Basis Sosial Tentang Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm 132

sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.

Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.

Seseorang yang tiada mempunyai pengetahuan atas informasi mengenai suatu masalah politik atau situasi politik mungkin merasa kurang kompeten untuk berpartisipasi dalam sesuatu usaha guna memecahkan masalahnya, atau untuk mengubah situasinya, maka kompetensi politiknya meningkat dengan bertambahnya pengetahuan. Kepribadian yang ramah, suka bergaul, dominan dan berjiwa sosial tinggi akan lebih condong melakukan kegiatan politik. Kondisi sosial masyarakat bisa dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan maupun sosial kemasyarakatan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang tinggi maka partisipasi masyarakatnya juga tinggi.

Kehidupan bermasyarakat di Temanggung dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial politik. Kegiatan pemilihan RT/RW, Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Temanggung menunjukkan keaktifan masyarakat dalam proses politik di lingkungannya. Pilkades yang digelar serentak di 227 berjalan lancar dan sukses yang juga menunjukkan masyarakat Temanggung adalah partisipasi yang berperan aktif dalam proses pemilihan baik di tingkat yang terkecil seperti RT/RW, Pilkades maupun Pilkada.

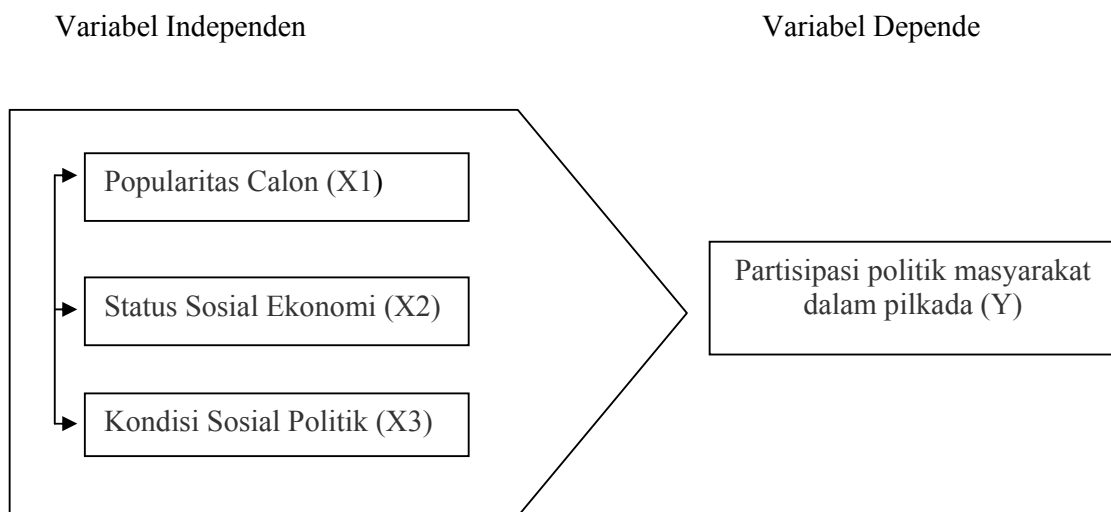
Keterlibatan masyarakat secara aktif dapat dilihat dari peran serta masyarakat dalam organisasi politik, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, partisipasi dalam pembangunan desa, musyawarah desa atau rembuk dusun yang kemudian disalurkan menjadi Musrenbang, aktif dalam proses kampanye maupun pada saat pencoblosan.

4. Model Analisa

Gambaran dari rencana kerangka pemikiran teoritis penelitian ini dapat dilihat berikut

Gambar 1.1.

Model Analisa



F. ANGGAHAN DASAR, DAN HIPOTESIS

1. Anggapan Dasar

Anggapan dasar atau postulat merupakan sebuah titik tolak pemikiran yang sebenarnya telah di terima oleh penyelidik yang melandasi penelitian²⁷.

Sebagai titik tolak pemikiran dalam melakukan penelitian adalah harus adanya anggapan dasar. Adapun anggapan dasar pada penelitian ini adalah memilih menggunakan hak pilihnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor popularitas calon, status sosial ekonomi serta kondisi sosial politik masyarakat tersebut.

2. Hipotesis

Hipotesis dapat di artikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul²⁸.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada 4 (empat) pernyataan, yaitu:

H1: *Terdapat pengaruh signifikan antara popularitas calon dan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada,*

yaitu semakin populer calon maka akan semakin tinggi partisipasi masyarakat

H2: *Terdapat pengaruh signifikan antara status sosial ekonomi dan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada,*

²⁷ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 58

²⁸ *Ibid.*, hlm. 64

yaitu semakin tinggi tingkat sosial ekonomi masyarakat maka semakin tinggi partisipasi masyarakat.

H3: *Terdapat pengaruh signifikan antara kondisi sosial politik dan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada,*

yaitu semakin tinggi tingkat sosial politik masyarakat maka semakin tinggi partisipasi masyarakat.

H4: *Popularitas calon, status sosial ekonomi masyarakat dan kondisi sosial politik secara simultan berhubungan positif terhadap partisipasi politik masyarakat,*

yaitu ketiga variabel yang digunakan secara bersama-sama memberikan hubungan positif terhadap partisipasi masyarakat.

G. DEFENISI KONSEP/OPERASIONAL VARIABEL

a. Defenisi Konsep

Defenisi konsep dari masing-masing variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses politik.
- b. Popularitas calon adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kandidat yang akan dipilih.
- c. Status sosial ekonomi masyarakat adalah tingkat pendapatan, tingkat pendidikan masyarakat.
- d. Faktor sosial politik merupakan basis yang membentuk demokrasi, yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang melibatkan peran serta

masyarakat. Faktor sosial politik menyangkut sikap, kesadaran dalam beraktivitas politik, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat umum menyangkut kehidupan berdemokrasi

b. Defenisi Operasional

Variabel-variabel yang diteliti perlu didefenisikan secara operasional untuk mempermudah dan membatasinya. Pemberian skor pada masing-masing indikator didasarkan dari 4 hipotesis yang dirumuskan. Skor yang tertinggi berarti semakin mendekati hipotesis, sedangkan skor yang terendah menunjukkan makin berlawanan/bertentangan dengan hipotesis. Adapun defenisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi politik, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pilkada menggunakan skor sebagai berikut:

- | | |
|---|-----|
| 1) Datang ke TPS dengan kesadaran sendiri | : 5 |
| Datang ke TPS dengan ajakan orang lain | : 3 |
| Tidak datang | : 1 |
| 2) Mencoblos | : 5 |
| Tidak mencoblos | : 1 |

b. Variabel popularitas calon menggunakan beberapa dimensi, yaitu tingkat pengenalan dan pengetahuan masyarakat terhadap pasangan kandidat. Variabel ini diukur dalam skala pengukuran 1 sampai dengan 5 menggunakan pengukuran sebagai berikut:

1) Pengetahuan terhadap pasangan calon

Kenal (K) : 5

Tidak Kenal (TK) : 1

2) Waktu pengenalan pasangan calon

Sebelum kampanye : 5

Saat kampanye : 3

Saat pencoblosan : 1

c. Faktor sosial ekonomi masyarakat dapat diukur dengan melihat tingkat pendidikan masyarakat, pekerjaan, tingkat pendapatan masyarakat dan aktivitas bermasyarakat. Tingkat pendidikan diukur dengan skor :

Pendidikan Tinggi/Sarjana (S1/S2) : 5

Pendidikan Sedang (SMU/SMP) : 3

Pendidikan Rendah (SD/Buta Huruf) : 1

Untuk pekerjaan diukur dengan : 1 Jenis pekerjaan utama

2. Pekerjaan sampingan

> Rp 1000.000 : 5

Rp 600.001 – Rp 1.000.000 : 3

< Rp 600.000 : 1

d. Faktor sosial politik masyarakat dapat diukur dengan melihat aktivitas masyarakat dalam proses politik antara lain dalam kegiatan kampanye, proses pemilihan kepala daerah, keterlibatan dalam persiapan pilkada, pemilihan kepala desa, kegiatan RT/RW, dan keterlibatan dalam rapat-rapat meliputi

rapat rembug dusun/desa atau musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang). Aktivitas sosial politik masyarakat dapat diukur dengan skala pengukuran 1 sampai dengan 5 sebagaimana variabel popularitas calon dan variabel status sosial ekonomi.

Skor tertinggi dalam penelitian ini adalah 5, sedangkan skor terendah adalah 1. Adapun cara pemberian skornya adalah sebagai berikut:

1. Apabila terdapat 2 alternatif jawaban, maka skor masing-masing jawaban adalah 1 (rendah) dan 5 (tinggi)
2. Apabila terdapat 3 alternatif jawaban, maka skornya adalah 1,3,dan 5.
1. Apabila terdapat 4 alternatif jawaban, maka skornya adalah 1,3,4 dan 5.
2. Apabila terdapat 5 alternatif jawaban, maka skornya adalah 1,2,3,4 dan 5.

Sedangkan perhitungan indeks atau gabungan untuk masing-masing variabel pokok dalam penelitian ini, yaitu partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah, popularitas calon, status sosial ekonomi, dan kondisi sosial politik adalah dengan cara menjumlahkan skor indikator yang mewakili variabel yang bersangkutan. Penggabungan skor tersebut dilakukan setelah diadakan pengelompokan kategori jawaban responden ke dalam kategori baru. Berdasarkan metode ini diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Indeks partisipasi politik

Indikator	Skor
a. Ikut pemungutan suara	
Datang ke TPS dengan keinginan sendiri	5
Datang ke TPS dengan ajakan orang lain	3

Tidak datang ke TPS	1
b. Menggunakan hak suara	
Mencoblos	5
Tidak mencoblos	1

Indeks Partisipasi :

Rendah = 2-6

Tinggi = 7-10

2. Indeks popularitas calon

Indikator	Skor
a. Tingkat pengenalan/pengetahuan terhadap pasangan calon	
Kenal (K)	5
Tidak kenal (TK)	1
b. Waktu pengenalan terhadap pasangan calon	
Sebelum kampanye	5
Saat kampanye	3
Saat pencoblosan	1

Indeks dukungan terhadap popularitas calon

Rendah = 2-6

Tinggi = 7-10

3. Indeks Status sosial ekonomi

Indikator	Skor
a. Pendidikan	
Tinggi (Sarjana S1/S2)	5
Sedang (SMA/SMP)	3
Rendah (SD/Buta huruf)	1
b. Penghasilan	
Tinggi (> Rp 1.000.000)	5
Sedang (Rp 600.001- 1.000.000)	3
Rendah (< Rp 600.000)	1

Indeks Status sosial ekonomi:

Rendah = 2-6

Tinggi = 7-10

4. Indeks kondisi sosial politik

Indikator	Skor
a. Peran dalam kampanye	
Sebagai pelaksana parpol	5
Sebagai simpatisan	3
Lainnya	1
b. Posisi dalam kampanye	
Pengurus/Koordinator	5

Anggota	3
Lainnya	1
c. Peran dalam pelaksanaan pilkada	
KPPS	5
Petugas Keamanan	3
Lainnya	1
d. Menggunakan hak suara dalam pilkades	
Mencoblos	5
Tidak Mencoblos	1
e. Kedudukan dalam rapat desa/dusun/dan kegiatan lain	
Ketua	5
Anggota	3
Tidak terlibat	1
f. Kehadiran dalam rapat	
Selalu	5
Kadang-kadang	3
Tidak pernah	1

Indeks kondisi sosial politik :

Rendah = 6-18

Tinggi = 19-30

H. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan. Pada penelitian ini penulis cenderung untuk menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survai untuk maksud penjelasan (explanatory atau confirmatory). Ciri khas penelitian ini adalah data dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya dengan menggunakan kuesioner. Salah satu keuntungan utama dari penelitian ini adalah mungkinnya pembuatan generalisasi untuk populasi yang besar²⁹.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama. Penelitian ini mengumpulkan data primer dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.
2. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder merupakan data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang berhubungan dengan masalah penelitian, rekapitulasi jumlah pemilih, jumlah TPS, jumlah responden maupun aktivitas sosial dan politik masyarakat yang terangkum dalam aktivitas politik masyarakat.

²⁹ Singarimbun, Metode Penelitian Survai, LP3ES, 1989, hal. 25

Teknik pengumpulan data primer menggunakan kuesioner, didukung dengan teknik dokumenter. Teknik pengujian validitas menggunakan korelasi product moment (Karl Pearson).

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Pelaksanaan penelitian senantiasa akan selalu berhadapan dengan masalah populasi, sebab suatu pengujian masalah selalu berhubungan dengan sekelompok subjek baik manusia, gejala ataupun peristiwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto³⁰ mengatakan definisi populasi sebagai berikut: “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.”

Berangkat dari pendapat ahli diatas maka dalam penelitian ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Temanggung yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 555.032 orang yang terbagi dalam 20 (dua puluh) kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

³⁰ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hal. 115

Tabel 1.7

**Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS
dalam Pilkada Temanggung Tahun 2008**

No	Kecamatan	Jumlah pemilih	Jumlah TPS
1	Temanggung	57.726	141
2	Tlogomulyo	15.754	40
3	Kranggan	34.758	76
4	Tembarak	21.027	43
5	Selopampang	13.634	31
6	Pringsurat	36.194	77
7	Kaloran	33.845	74
8	Parakan	38.233	88
9	Bansari	17.328	44
10	Kledung	20.025	48
11	Kedu	40.902	83
12	Bulu	33.716	76
13	Kandangan	36.413	79
14	Candiroto	23.773	54
15	Bejen	14.885	39
16	Jumo	21.683	49
17	Gemawang	23.404	53
18	Tretep	14.496	35
19	Wonoboyo	18.318	47
20	Ngadirejo	38.918	92
Jumlah		555.032	1.269

Sumber: Desk Pilkada Temanggung, Tahun 2008

b. Sampel Penelitian

Karena tidak memungkinkan setiap peneliti menyelidiki populasi secara keseluruhan, sedangkan penelitian bertujuan untuk menemukan generalisasi yang berlaku secara umum, maka seringkali peneliti mengambil sebagian dari populasi penelitian yaitu sebuah sampel.

Untuk menentukan sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dapat menggunakan beberapa langkah sebagai berikut³¹:

³¹ Eriyanto, Teknik Sampling: Analisis Opini Publik, LKIS, 2007, hlm. 292

1). Menentukan Besar Sampel

Untuk menentukan besarnya sampel dari populasi yang jumlahnya besar adalah sebagai berikut:

$$N = \frac{(p \times q) \cdot Z^2}{E^2}$$

- Z = Mengacu pada nilai z (tingkat kepercayaan). Jika tingkat kepercayaan yang dipakai 90%, nilai z adalah 1.65. Tingkat kepercayaan 95%, nilai z adalah 1,96, sedangkan tingkat kepercayaan 99%, nilai z adalah 2.58
- (pxq) = Variasi populasi. Variasi populasi disini dinyatakan dalam bentuk proporsi. Proporsi dibagi kedalam dua bagian dengan total 100% (atau 1). Yaitu proporsi memilih dan proporsi tidak memilih. Proporsi yang digunakan adalah pada saat keragaman tertinggi terjadi dimana p= 81,03% atau 0,81 dan q=18,97% atau 0,19
- E = Kesalahan sampling yang dikehendaki (*sampling error*), yaitu 5% yaitu 0,05
- N = Jumlah populasi

Hasil perhitungan dari rumus diatas adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{(0,81 \times 0,19) \cdot 1,96^2}{0,05^2} \\ &= 236,48 = 236 \text{ responden} \end{aligned}$$

2). Menentukan Jumlah sampel TPS

Ukuran PSU yang digunakan adalah 9 orang responden di tiap TPS sehingga jumlah sampel TPSnya $236:9 = 26,22$ (27 TPS).

Tabel 1.8

**Rekapitulasi Sample *Primary Sampling Unit* (PSU)
Tempat Pemungutan Suara**

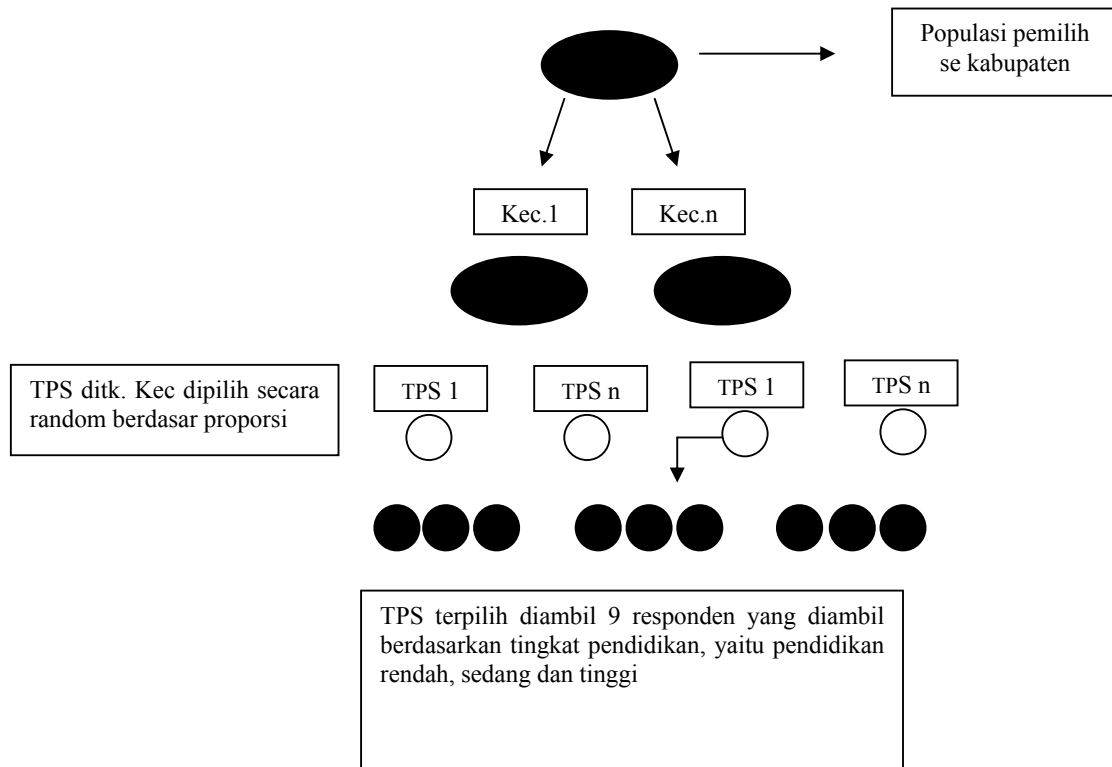
No	Kecamatan	Populasi (TPS)	Sampel (TPS)	Hasil Random
1	Temanggung	141	3	60,11,79
2	Tlogomulyo	40	1	17
3	Kranggan	76	1	32
4	Tembarak	43	1	43
5	Selopampang	31	1	23
6	Pringsurat	77	2	38,29
7	Kaloran	74	1	52
8	Parakan	88	2	13,77
9	Bansari	44	1	43
10	Kledung	48	1	30
11	Kedu	83	2	25,65
12	Bulu	76	1	7
13	Kandangan	79	2	13,66
14	Candiroto	54	1	14
15	Bejen	39	1	25
16	Jumo	49	1	22
17	Gemawang	53	1	47
18	Tretep	35	1	28
19	Wonoboyo	47	1	30
20	Ngadirejo	92	2	14,81
Jumlah		1.269	27	

*) Hasil randomisasi menggunakan program Microsoft Excel

Teknik pengambilan sampel secara twostage random sampling. Adapun penjabaran teknisnya adalah sebagai berikut

Gambar 1.2

Flow Chart: Twostage Random Sampling



Adapun distribusi sampel TPS dan jumlah responden di tiap-tiap kecamatan pada tabel berikut:

Tabel 1.9

Rekapitulasi Jumlah Responden di masing-masing Kecamatan

No	Kecamatan	Perhitungan berdasarkan tk. Pendidikan Tinggi, sedang dan rendah		Total Responden/kec
		Jumlah responden	TPS	
1	Temanggung	9	3	27
2	Tlogomulyo	9	1	9
3	Kranggan	9	1	9
4	Tembarak	9	1	9
5	Selopampang	9	1	9
6	Pringsurat	9	2	18
7	Kaloran	9	1	9
8	Parakan	9	2	18
9	Bansari	9	1	9
10	Kledung	9	1	9
11	Kedu	9	2	18
12	Bulu	9	1	9
13	Kandangan	9	2	18
14	Candirotto	9	1	9
15	Bejen	9	1	9
16	Jumo	9	1	9
17	Gemawang	9	1	9
18	Tretep	9	1	9
19	Wonoboyo	9	1	9
20	Ngadirejo	9	2	18
		Jumlah	27	243

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data tersebut maka di perlukan adanya metode pengumpulan data. Adapun metode yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yakni masyarakat kabupaten Temanggung yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tersebut bersifat terbuka dan

tertutup yang digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian ini³².

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan berpedoman pertanyaan dari kuesioner.

3. Studi literatur / kajian kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dan hubungan dengan objek penelitian guna mendapatkan informasi teoritis.

4 Teknik Analisis Data

- 1) Analisis deskriptif kuantitatif, untuk mengukur tingkat partisipasi politik, popularitas calon, status sosial ekonomi, dan faktor sosial politik dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi dan persentase.
- 1) Analisa kualitatif yang tidak menggunakan model matematik, statistik atau ekonometrik lainnya. Analisis yang terbatas hanya pada teknik pengolahan datanya seperti pengecekan data dan tabulasi, dalam hal ini hanya sekedar membaca tabel-tabel dan angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.
- 3) Atas dasar hasil analisis tabel frekuensi, disusun tabel silang untuk melihat kecenderungan hubungan serta arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

³² *Op.cit.*, hlm. 192

4) Analisis hubungan variabel dengan menggunakan statistik korelasi product moment untuk menguji hipotesis I, II, III, dan IV, adanya hubungan antara variabel X_{1,2,3} (popularitas calon, status sosial ekonomi, dan faktor sosial politik dengan variabel y (partisipasi politik) dengan taraf signifikan 5%. Nilai hitung koefisien korelasi dijabarkan berdasarkan rumus r_{xy} (Sugiyono 1992 :142)

sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\sum XY}{\sqrt{(\sum X^2)(\sum Y^2)}}$$

Dimana :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y.

$\sum xy$ = Jumlah product dari variabel X dan variabel Y.

$\sum X^2$ = Jumlah kuadrat variabel X.

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat variabel Y.

Selain rumus tersebut dapat juga digunakan rumus berikut³³

$$r_{XY} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Korelasi produk-momen ini dipergunakan untuk menghitung kuatnya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dengan rumus ini dapat dicari koefisien korelasi antara dua variabel.

³³ Suharsimi Arikunto, *loc.cit.*, hlm. 218

Analisis korelasi ini mempunyai berbagai prasyarat yang harus dipenuhi, antara lain adanya distribusi normal dari data penelitian serta data bersifat interval. Kedua syarat ini akan dinormalisir melalui program statistik komputer, dimana dari masing-masing indikator yang mewakili variabel yang diuji digabung sehingga menghasilkan skor interval. Dari skor inilah perhitungan korelasi dapat dimunculkan.

Menurut Sugiyono pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 – 0,199	= sangat rendah
0,20 – 0,399	= rendah
0,40 – 0,599	= sedang
0,60 – 0,799	= kuat
0,80 – 1,000	= sangat kuat

5) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan :

Y' = variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X_1, X_2, X_n = variabel independen

a = Konstanta (nilai Y' apabila $X_1, X_2, \dots, X_n = 0$)

b = Koefisien regresi
(nilai peningkatan ataupun penurunan)

BAB II

KONDISI UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1 Kondisi Sosial Budaya

Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah Propinsi Jawa Tengah, dan secara astronomis terletak pada: $110^{\circ}23'$ – $110^{\circ}46'30''$ bujur timur dan $7^{\circ}14'$ – $7^{\circ}32'35''$ lintang selatan. Secara geo-ekonomis dilalui oleh tiga jalur pusat kegiatan ekonomi, yaitu: Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km). Secara umum wilayah Kabupaten Temanggung berhawa sejuk, yakni dengan suhu berkisar antara 20° – 30° C. Hal itu terjadi karena Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi, yang sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian antara 500 – 1.450 m dpl.

Secara administratif Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 20 kecamatan, 266 desa dan 23 kelurahan, dengan batas administratif; Kabupaten Kendal di sebelah utara, Kabupaten Semarang di sebelah timur, Kabupaten Magelang di sebelah selatan, dan Kabupaten Wonosobo di sebelah barat. Pembagian wilayah administratif Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Jlh Desa	Jlh Kelurahan
1	Parakan	14	2
2	Kledung	13	-
3	Bansari	13	-
4	Bulu	20	-
5	Temanggung	6	19
6	Tlogomulyo	14	-
7	Tembarak	14	-
8	Selopampang	12	-
9	Kranggan	12	1
10	Pringsurat	12	-
11	Kaloran	11	-
12	Kandangan	16	-
13	Kedu	14	-
14	Ngadirejo	19	1
15	Jumo	14	-
16	Gemawang	11	-
17	Candiroto	14	-
18	Bejen	14	-
19	Tretep	11	-
20	Wonoboyo	12	-
	Jumlah	266	23

Diolah dari: Temanggung dalam angka tahun 2007

Berdasarkan data pada tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa tidak semua kecamatan memiliki kelurahan. Kecamatan yang mempunyai kelurahan ada 4 kecamatan, yaitu Temanggung sebanyak 19 kelurahan, Parakan 2 kelurahan, Kranggan 1 kelurahan dan Ngadirejo 1 kelurahan.

Selanjutnya pada tabel berikut dapat dilihat komposisi masyarakat Temanggung:

Tabel 2.2

**Jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	31.592	30.701	62.293
5-9	31.702	30.458	62.160
10-14	33.613	31.508	65.121
15-19	33.210	31.198	64.408
20-24	29.767	29.929	59.696
25-29	29.634	30.733	60.407
30-34	29.944	31.420	61.364
35-39	28.273	29.058	57.331
40-44	25.741	24.611	50.352
45-49	20.806	18.658	39.464
50-54	14.022	14.116	28.138
55-59	12.494	12.655	25.149
60-64	11.551	12.445	23.996
65 +	17.706	25.761	43.467
Jumlah	350.055	353.291	703.386

Sumber: Temanggung dalam Angka tahun 2007

Dari tabel 2.2 jumlah penduduk perempuan lebih banyak disbanding penduduk laki-laki. Tetapi dilihat dari kelompok umur dibawah 20 tahun, laki-laki lebih banyak. Demikian pula untuk kelompok usia 17 tahun (pemilih pemula) di Temanggung sebanyak 15.134 orang, jumlah laki-laki sebanyak 7.965 orang adalah lebih besar disbanding perempuan sebanyak 7.169 orang.

Aspek lainnya yang dapat dipergunakan untuk melihat potensi sumber daya daerah adalah tingkat pendidikan masyarakatnya. Sebagai gambaran awal tentang komposisi penduduk di Kabupaten Temanggung menurut tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3

**Penduduk usia 5 tahun ke atas menurut Pendidikan
Dirinci perkecamatan di Kabupaten Temanggung**

Kecamatan	D IV/ Sarjana	DI/DII/ DIII	SLTA	SLTP	SD	Tidak/ Blm Tamat SD	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Parakan	1.133	512	4.864	6.642	18.697	12.101	43.949
2.Kledung	340	112	1.828	3.296	11.892	6.419	23.887
3.Bansari	156	106	1.485	2.876	9.149	6.515	20.287
4.Bulu	654	284	2.764	4.091	17.299	13.414	38.506
5.Temanggung	5.872	2.476	15.583	12.996	21.715	9.900	68.542
6.Tlogomulyo	485	180	1.883	3.127	7.486	5.361	18.522
7.Tembarak	181	126	1.834	3.427	11.094	8.187	24.849
8.Selopampag	120	79	1.201	2.221	7.194	5.271	16.086
9.Kranggan	984	367	3.987	6.236	15.050	11.442	38.066
10.Pringsurat	591	192	3.314	5.957	20.501	10.039	40.594
11.Kaloran	349	173	2.343	5.139	17.837	12.923	38.764
12.Kandangan	484	279	2.428	5.336	16.230	16.898	41.655
13.Kedu	1.167	402	4.038	6.023	21.933	12.179	45.742
14.Ngadirejo	1.166	496	4.086	7.695	18.162	14.985	46.590
15.Jumo	197	106	1.058	2.361	11.005	9.954	24.681
16.Gemawang	91	54	783	2.393	12.708	10.022	26.051
17.Candiroto	377	240	1.916	3.503	12.542	9.823	28.401
18.Bejen	228	147	1.103	2.247	7.461	6.483	17.669
19.Tretep	57	38	500	1.602	8.235	6.682	17.114
20.Wonobojo	80	45	661	1.943	10.149	8.220	21.098
Jumlah	14.712	6.414	57.659	89.111	276.339	196.818	641.053

Sumber: Temanggung dalam Angka Tahun 2007

Dari tabel 2.3 dapat dilihat bahwa penduduk berpendidikan SD sejumlah 196.818 orang atau 43% dari total keseluruhan, sedangkan untuk pendidikan tinggi (D IV atau Sarjana) sebanyak 14.712 orang atau sekitar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk berpendidikan tinggi di Temanggung persentasenya masih rendah.. Pada Kecamatan Gemawang, Tretep dan Wonobojo penduduk berpendidikan tinggi menunjukkan persentase rata-rata hanya 0,003%. Ketiga kecamatan tersebut juga merupakan wilayah yang terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan. Sedangkan di kecamatan Temanggung, Parakan, Kedu dan Ngadirejo adalah wilayah-wilayah yang penduduknya paling banyak

berpendidikan tinggi. Meskipun demikian, secara keseluruhan tingkat tingkat pendidikan masyarakat Temanggung masih tergolong rendah.

Masyarakat Temanggung merupakan orang-orang yang sebagian besar beragama Islam. Kondisi yang sangat agamis mudah dijumpai pada setiap kegiatan bermasyarakat. Untuk lebih jelasnya dalam tabel berikut dapat dilihat Agama Islam merupakan populasi yang sangat besar di Temanggung:

Tabel 2.4
Banyaknya Pemeluk Agama Dirinci
per Kecamatan di Kabupaten Temanggung

Kecamatan	Pemeluk Agama				
	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha
1	2	3	4	5	6
1.Parakan	45910	1049	1732	-	365
2.Kledung	26071	112	128	-	-
3.Bansari	21637	53	198	-	465
4.Bulu	41571	628	328	-	205
5.Temanggung	63800	8293	4651	8	89
6.Tlogomulyo	20226	132	183	-	151
7.Tembarak	27611	28	2	-	-
8. Selopampang	17729	82	138	-	-
9.Kranggan	39171	1624	553	-	-
10.Pringsurat	43593	673	428	-	229
11.Kaloran	33898	875	761	-	7726
12.Kandangan	43074	1740	1672	-	-
13.Kedu	49833	624	475	-	-
14.Ngadirejo	50711	531	693	11	65
15.Jumo	25152	582	452	-	1390
16.Gemawang	28660	133	190	-	150
17.Candiroto	27883	1601	1451	206	386
18.Bejen	19442	139	59	-	294
19.Tretep	18301	230	445	-	-
20.Wonobooyo	23153	142	36	-	85
Jumlah	667426	19271	14575	225	11600

Sumber: Temanggung dalam Angka Tahun 2007

Dari tabel 2.4 terlihat bahwa penduduk muslim merupakan populasi yang terbesar di Temanggung. Kabupaten ini merupakan basis utama kaum santri yang didominasi oleh kultur NU. Mulai dari tata cara peribadatan, aktivitas sosial, bahkan sampai pandangan sikap politik. Banyak pondok pesantren, Taman Pendidikan al Quran (TPQ), dan aktivitas yang menunjukkan geliat warga Nadliyin di Temanggung. Hal ini menjadikan pasangan calon seolah mempunyai standar wajib dalam komposisinya, yakni salah satu dari pasangan calon harus berasal dari basis NU.

Prediksi ini benar, dua kandidat Bupati adalah orang besar dikalangan NU, yaitu Hasyim Afandi yang juga Ketua MUI dan Mukhamad Irfan, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai yang mempunyai basis di kalangan Islam tradisional ini. Bambang Sukarno yang berasal dari kalangan nasionalis juga tidak ketinggalan menggandeng Fuad Hidayat, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sekaligus salah satu tokoh muda NU.

Salah satu nilai budaya masyarakat Kabupaten Temanggung pada umumnya adalah solidaritas primordial. Bentuk solidaritas masyarakat terbagi dalam dua tingkatan. Pertama, pengetahuan/pemahaman yaitu tingkatan masyarakat yang masih dalam taraf fakir. Sebagian besar masyarakat termasuk dalam kategori ini, terutama bagi mereka yang masih berada dibawah garis kemiskinan seperti petani dan buruh. Akan tetapi masyarakat yang berada dalam kategori ini bukan sekedar mengetahui nilai-nilai solidaritas yang mereka miliki. Mereka dapat menjelaskan secara konseptual dan tampak dalam kemampuan daya

interpretasinya baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat lainnya.

Kedua, penerapan, yaitu tingkatan masyarakat yang sudah mampu mengaplikasikan nilai-nilai solidaritas yang dimilikinya. Nilai-nilai solidaritas tersebut menjelma dalam bentuk sosialisasi nilai, bentuk interaksi sosial dan konsensus atau kesepakatan bersama. Beberapa kegiatan masyarakat yang merupakan penerapan nilai solidaritas tersebut seperti gotong-royong, kumpulan RT/RW, tahlilan serta partisipasi dalam mendukung pembangunan, Inti dari bentuk-bentuk nilai budaya tersebut adalah sikap solidaritas dan tolong menolong sesama warga. Berikut ini adalah tabel yang merupakan wujud keterlibatan berupa swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Tabel 2.5

**Besarnya Swadaya Masyarakat Murni dan Pendukung
Kegiatan Pembangunan Dirinci per Kecamatan
Di Kab. Temanggung**

Kecamatan	Swadaya Murni		Pendukung Kegiatan	
	Jumlah Kegiatan	Nilai Swadaya (Rp)	Jumlah Kegiatan	Nilai Swadaya (Rp)
1	2	3	4	5
1.Parakan	36	661.130.000	72	394.688.000
2.Kledung	54	208.752.000	36	720.220.000
3.Bansari	30	319.200.000	15	896.084.000
4.Bulu	39	646.936.000	37	1.277.614.700
5.Temanggung	70	518.860.000	69	326.221.000
6.Tlogomulyo	3	357.000.000	36	404.889.620
7.Tembarak	108	1.881.703.000	15	701.171.000
8. Selopampang	54	668.112.500	35	727.720.000
9.Kranggan	39	208.796.500	50	616.144.342
10.Pringsurat	80	944.979.000	29	451.159.400
11.Kaloran	103	534.500.000	25	277.261.900
12.Kandangan	19	378.400.000	52	378.106.200
13.Kedu	164	1.196.234.000	85	1.068.294.400
14.Ngadirejo	20	176.891.000	95	606.354.500
15.Jumo	69	289.393.000	41	243.025.008
16.Gemawang	11	152.900.000	13	160.419.000
17.Candiroto	50	343.473.000	26	159.107.000
18.Bejen	70	1.030.951.000	14	178.551.000
19.Tretep	93	1.072.333.750	49	368.931.000
20.Wonoboyo	49	763.652.000	45	511.053.000
Jumlah	1.161	12.354.196.750	839	10.467.015.070

Sumber: Temanggung dalam Angka Tahun 2007

Dari tabel 2.5 menunjukkan tingginya swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Temanggung peduli terhadap pembangunan di lingkungannya.

2.2. Kondisi Perekonomian

Tingkat kemajuan suatu daerah secara umum dapat tergambar dari kondisi perekonomiannya. Namun yang terpenting dari semua itu adalah akses masyarakat terhadap kemajuan perekonomian yang dicapainya. Perekonomian masyarakat Kabupaten Temanggung sebagian besar menggantungkan diri pada sektor pertanian.

Bertahannya sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian penduduk tidak terlepas dari pengaruh kondisi geografis dan kondisi tanah yang luas dan subur. Sebagian besar wilayah ini berupa areal pertanian dengan bentangan persawahan yang luas. Sudah barang tentu sebagian besar penduduknya hidup dari sektor pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.6

**Penduduk yang bekerja menurut mata pencaharian
Dirinci per Kecamatan di Kabupaten Temanggung**

Kecamatan	Mata pencaharian							Jumlah
	Pertanian	Industri	Bangunan	Perdagangan	Pengangkutan	Jasa	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Parakan	10.129	1.862	1.486	6.730	1.410	5.531	485	27.633
2.Kledung	6.022	555	1.172	3.309	426	1.468	219	13.171
3.Bansari	5.337	492	1.042	2.946	383	1.304	196	11.700
4.Bulu	12.459	172	998	2.306	546	1.505	135	18.121
5.Temanggung	15.769	2.900	2.331	10.561	2.214	8.681	759	43.215
6.Tlogomulyo	7.241	1.046	778	1.290	390	908	52	11.705
7.Tembarak	8.723	121	704	1.041	297	666	58	11.610
8.Selopampang	5.644	78	461	678	198	434	38	7.531
9.Kranggan	15.877	2.291	1.701	2.811	849	1.979	112	25.620
10.Pringsurat	19.807	3.053	1.340	2.686	597	1.805	73	29.361
11.Kaloran	16.461	1.333	899	1.623	655	1.116	169	22.256
12.Kandangan	15.682	596	991	2.559	735	1.315	128	22.006
13.Kedu	22.194	4.916	1.601	3.574	1.295	2.194	101	35.875
14.Ngadirojo	13.289	841	2.271	8.350	1.374	2.384	119	28.628
15.Jumo	8.420	361	844	1.737	361	814	97	12.634
16.Gemawang	9.300	399	922	1.899	392	889	107	13.908
17.Candiroto	10.000	95	680	1.211	352	675	41	13.054
18.Bejen	5.998	57	404	722	211	401	24	7.817
19.Tretep	6.475	37	460	384	67	199	15	7.637
20.Wonobojo	8.164	45	575	483	83	251	18	9.619
Jumlah	222.991	21.250	21.660	56.900	12.835	34.519	2.946	373.101

Sumber: Temanggung dalam Angka Tahun 2007

Berdasarkan tabel 2.6 jelas terlihat bahwa pertanian merupakan mata pencaharian yang mendominasi kehidupan masyarakat Temanggung. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang sangat bergantung pada sektor pertanian, berdampak bagi rendahnya daya beli masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, artinya daya serap sektor pertanian terhadap tenaga kerja dan pendapatan penduduk berpengaruh terhadap taraf kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, penciptaan lapangan pekerjaan dan penyebarannya secara proporsional membutuhkan sentuhan yang konstruktif dari semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun pengusaha guna terciptanya iklim yang kondusif bagi munculnya institusi-institusi ekonomi baru.

Kondisi perekonomian rakyat pada suatu daerah tertentu membuka peluang interaksi antar kelompok elite dan massa. Dan untuk kepentingan politik tertentu bisa saja alasan tersebut dipergunakan oleh kelompok tertentu untuk menciptakan ketergantungan penduduk terhadap sumber-sumber ekonomi yang dikuasainya juga berpengaruh dalam penggunaan hak-hak politik masyarakat.

2.3. Kondisi Politik dan Pemerintahan

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Temanggung telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah bertambahnya jumlah kecamatan yang awalnya hanya berjumlah 16 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan bertambahnya jumlah desa yang beralih menjadi kelurahan sebanyak 23 kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7

**Pembagian Wilayah Administrasi dirinci
perKecamatan di Kabupaten Temanggung**

Kecamatan	Jlh Desa/Kel	Dusun/Lingk	RT	RW
1	2	3	4	5
1.Parakan	16	79	319	77
2.Kledung	13	35	152	38
3.Bansari	13	40	175	45
4.Bulu	19	89	279	91
5.Temanggung	25	128	573	136
6.Tlogomulyo	12	49	152	44
7.Tembarak	13	72	216	63
8.Selopampang	12	45	126	44
9.Kranggan	13	114	337	93
10.Pringsurat	14	160	354	144
11.Kaloran	14	106	401	104
12.Kandangan	16	105	361	106
13.Kedu	14	106	408	106
14.Ngadirejo	20	89	399	96
15.Jumo	13	60	264	60
16.Gemawang	10	62	295	64
17.Candiroto	14	108	268	80
18.Bejen	14	47	163	46
19.Tretep	11	30	133	27
20.Wonobojo	13	60	193	60
Jumlah	289	1.584	5.568	1.524

Sumber: Temanggung dalam Angka Tahun 2007

Dari tabel 2.7 dapat dilihat bahwa kecamatan Temanggung adalah wilayah yang paling banyak desa/kelurahannya. Kecamatan Temanggung merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian yang terdiri dari 19 kelurahan dan 6 desa. Sedangkan yang paling sedikit desanya adalah kecamatan Gemawang dan Tretep yang masing-masing terdiri dari 10 dan 11 desa. Pada kedua kecamatan tersebut tidak memiliki kelurahan. Kedua kecamatan tersebut merupakan wilayah yang jumlah penduduknya paling sedikit dan jauh dari pusat pemerintahan dan perekonomian. Sementara kondisi politik dapat dilihat dari komposisi perolehan kursi DPRD hasil pemilu 2004 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8

**Perolehan Suara untuk 7 Partai Besar pada Pemilu Legislatif
Kabupaten Temanggung Tahun 2004**

Kecamatan	Nama-nama Partai						
	PDI-P	Golkar	PPP	PAN	Demokrat	PKB	PKS
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Temanggung	9.471	7.670	3.814	3.235	5.302	5.202	2.701
2.Selopampang	899	1.946	2.957	853	416	1.308	244
3.Tembarak	1.888	1.669	3.781	1.775	568	3.433	627
4.Tlogomulyo	2.409	2.380	2.026	633	384	1.459	319
5.Bansari	3.872	3.615	1.436	395	413	1.534	1.470
6.Bulu	4.180	10.055	4.980	1.373	854	2.413	639
7.Parakan	5.481	5.141	3.797	2.795	2.130	4.824	1.351
8. Kledung	3.913	5.276	2.274	811	455	1.499	573
9.Kandangan	3.901	4.694	6.736	2.929	1.815	2.319	1.329
10.Kedu	4.753	5.005	6.503	3.307	1.848	4.593	1.322
11.Kaloran	4.989	5.377	5.649	1.157	978	1.638	858
12.Pringsurat	4.983	4.390	4.576	861	1.208	6.268	1.153
13.Kranggan	5.594	5.533	3.044	1.520	1.125	2.576	1.845
14.Gemawang	3.263	3.637	3.499	2.274	320	2.479	1.359
15.Ngadirejo	7.253	4.269	3.210	4.738	1.348	5.583	1.556
16.Jumo	4.642	2.630	2.853	1.560	746	2.303	893
17.Candiroto	3.219	6.131	1.679	2.345	808	2.453	1.124
18.Bejen	1.682	5.301	951	942	202	974	278
19.Tretep	1.083	2.302	4.861	1.146	58	767	350
20.Wonoboyo	1.618	3.813	3.886	1.002	1.161	982	940
Jumlah	79.093	90.834	72.512	35.651	22.139	54.607	20.931

Diolah dari: KPUK Temanggung tahun 2008

Dari tabel 2.8 dapat dilihat bahwa perolehan suara kursi terbanyak diraih oleh partai Golkar sebanyak 90.834(21,33%), PDIP 79.093 (18,87%), PPP 72.512 (17,08%) disusul PKB (12,82%), PAN (8,87%), Demokrat (5,2%) dan PKS (4,91%). Pasangan calon yang menang pada pilkada tahun 2008 berasal dari Golkar. Sedangkan pada pemilu sebelumnya yaitu pada tahun 1999 PDIP memperoleh suara terbanyak di DPRD Temanggung sebanyak 14 kursi: PKB 9

kursi; PPP 7 kursi; Golkar 5 kursi; PAN 2 kursi; dan PNU; PBB; dan Partai Keadilan masing-masing 1 kursi. Hasil pemilu legislatif tahun 2004 di Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa tidak ada partai yang menang mutlak atau mengantongi suara mayoritas. Bahkan kemenangan partai politik dikecamatan Temanggung, Kedu, Parakan dan Candiroto menunjukan hasil yang tidak signifikan, kemenangan dengan selisih sangat tipis³⁴. Sedangkan hasil perolehan suara pada pilpres dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.9

**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Jumlah Suara
pada Pemilihan Presiden untuk Kab. Temanggung
Tahun 2004**

Kecamatan	Pemilih yang terdaftar dalam DPT		Jumlah
	Yang menggunakan hak suara	tidak menggunakan hak suara	
1.Temanggung	47113	8352	55645
2.Tembarak	16133	3139	19272
3.Selopampang	11017	1584	12601
4.Tlogomulyo	13437	1235	14672
5.Parakan	31010	5354	36364
6.Bulu	27834	3562	31396
7.Kledung	16977	2401	19378
8. Bansari	15032	1543	16575
9.Kandangan	27638	5674	33312
10.Kedu	31253	6452	37705
11.Kaloran	25726	5850	31576
12.Pringsurat	28510	4617	33127
13.Kranggan	26090	5628	31718
14.Ngadirojo	32372	4386	36758
15.Jumo	17728	2539	20267
16.Gemawang	19051	3249	22300
17.Candiroto	19237	2844	22081
18.Bejen	11512	1832	13344
19.Tretep	12134	1736	13870
20.Wonoboyo	14402	2758	17160
Jumlah	444206	74735	519121

Diolah dari: KPUD Temanggung, 2008

³⁴ Buletin Ayo Milih, *op.cit*

Dari tabel 2.9 diketahui hasil perolehan suara pada pemilihan presiden tahun 2004 perolehan suara yang masuk dari 20 kecamatan sebanyak 444.206 (86 %) sedangkan yang tidak menggunakan hak suara sebanyak 74.735 (14,40%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi masyarakat Temanggung relatif stabil dimana tingkat partisipasi pilkada tahun 2008 sebesar 81,03 hanya terpaut sedikit dengan hasil perolehan suara pada pilpres tahun 2004 sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab I.

Perolehan suara di masing-masing wilayah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10

**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Jumlah Suara
pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Temanggung
Tanggal 22 Juni 2008**

Kecamatan	Pemilih yang terdaftar dalam DPT		Jlh	Persentase
	Menggunakan Hak suara	Tidak menggunakan Hak suara		
1	2	3	4	5
1.Temanggung	46.621	11.105	57.726	80,8
2.Tlogomulyo	13.961	1.793	15.754	88,6
3.Kranggan	26.498	8.260	34.758	76,2
4.Tembarak	17.029	3.998	21.027	81,0
5.Selopampang	11.301	2.333	13.634	82,9
6.Pringsurat	28.469	7.725	36.194	78,7
7.Kaloran	25.592	8.253	33.845	75,6
8. Parakan	30.865	7.368	38.233	80,7
9.Bansari	14.666	2.662	17.328	84,6
10.Kledung	16.563	3.462	20.025	82,7
11.Kedu	32.713	8.189	40.902	80,0
12.Bulu	28.496	5.220	33.716	84,5
13.Kandangan	29.025	7.388	36.413	79,7

1	2	3	4	5
14.Candiroto	19.283	4.490	23.773	81,1
15.Bejen	12.015	2.870	14.885	80,7
16.Jumo	17.827	3.856	21.683	82,2
17.Gemawang	19.054	4.350	23.404	81,4
18.Tretep	12.546	1.950	14.496	86,5
19.Wonoboyo	14.980	3.338	18.318	81,8
20.Ngadirejo	32.244	6.674	38.918	82,9
Jumlah	449.748	105.284	555.032	

Diolah dari KPUD Temanggung, 2008

Berdasarkan tabel 2.10 diketahui bahwa kecamatan Tembarak memiliki perolehan suara terbanyak yakni 88,61%. Perolehan suara terendah adalah kecamatan Kaloran sebesar 75,61%. Kecamatan Tretep yang penduduknya mayoritas berpendidikan rendah ternyata perolehan suaranya mencapai 86,5%,. Ini menunjukkan perolehan suara di Kecamatan Tretep tertinggi setelah kecamatan Tembarak. Sedangkan kecamatan Temanggung sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian serta penduduknya yang mayoritas berpendidikan tinggi dibanding kecamatan lainnya, perolehan suaranya hanya 80,8%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi serta posisi strategis suatu kecamatan tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah. Pada kabupaten Temanggung perolehan suara terbanyak diperoleh kecamatan yang terpencil dan jauh dari pusat perekonomian dan pemerintahan serta penduduknya yang mayoritas berpendidikan rendah.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008

Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan Pilkada Temanggung yang dilaksanakan pada 22 Juni 2008 dari segi pelaksanaannya cukup unik karena melewati proses peralihan dua Undang Undang berdasar pada dua Undang Undang, yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Ada beberapa perubahan cara pelaksanaannya, diantaranya masa kerja PPK dan PPS yang diperpanjang dari 6 bulan menjadi 8 bulan, adanya petugas yang secara khusus menangani pendaftaran pemilih (Gastarlih) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dihapusnya kesekretariatan pada Panitia Pemungutan Suara (PPS), jumlah pemilih di setiap TPS berkisar 400-500 orang, rekapitulasi perhitungan suara dilakukan di PPK (dalam Pemilu sebelumnya dilakukan di PPS).

Penyelenggaraan Pilkada 2008 dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan prosedural dan substansial dari Pilkada. Tujuan prosedural adalah proses penyelenggaraannya sesuai dengan perundang-undangan, terjadwal dan tepat waktu, serta tidak mengganggu stabilitas operasional daerah. Sedangkan tujuan substansial adalah terpilihnya pemimpin yang amanah dan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat dalam suasana yang aman, damai dan demokratis³⁵. Sejalan

³⁵ Tim Dokumentasi KPU Temanggung "Potret Demokrasi Wong Temanggung, November 2008, hal. 32

dengan pemikiran tersebut, maka perlu kiranya dijelaskan pelaksanaan pilkada Temanggung yang melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

2.1. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Tahapan Persiapan

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah penyelenggaraan program kegiatan pada tahapan persiapan dilaksanakan mulai dengan pemberitahuan DPRD Kabupaten Temanggung kepada Bupati Temanggung mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, kemudian pemberitahuan DPRD Kabupaten Temanggung kepada KPUD Kabupaten Temanggung mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, sampai pada penyampaian keputusan tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu serta Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pilbup Temanggung. Setelah tahapan persiapan rampung, maka dilanjutkan pada tahapan pelaksanaan. Dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu, tahapan persiapan pelaksanaan pilkada Temanggung dimulai pada bulan Nopember tahun 2007. Artinya dipersiapkan 8 bulan sebelum waktu pencoblosan yang jatuh pada tanggal 22 Juni 2008. Salah satu strategi yang dilakukan oleh KPU Temanggung sebagai lembaga penyelenggara pilkada adalah pada tanggal 14 Nopember 2007 melakukan rapat koordinasi dengan Camat se Kabupaten Temanggung dan Desk Pilkada. Yang menjadi agenda rapat adalah persiapan penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Gubernur.

Pertama, mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2008. Salah satu tahapan rekrutmen anggota

panitia pelaksana pilkada tingkat kecamatan dijadwalkan mulai tanggal 17 sampai dengan 22 Nopember 2007. Kemudian untuk Panitia Pemungutan Suara akan diselenggarakan di desa mulai tanggal 7 s/d 9 Desember 2007. Jumlah anggota PPK yang dibutuhkan terdiri dari 5 orang per kecamatan dan PPS berjumlah 3 orang tiap desa.

Kedua, mengenai sosialisasi dimasyarakat menjadi agenda berat bagi KPU Temanggung. Materi sosialisasi yang diberikan tentang UU Penyelenggaraan (UU No 32 Tahun 2004, Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 dan 21 Tahun 2005, UU nomor 22 Tahun 2007 dan PP Nomor 6 Tahun 2005, Permendagri Nomor 44 Tahun 2007) serta petunjuk teknis pemilihan.

B. Tahapan Pelaksanaan

Secara umum penyelenggaraan kegiatan tahapan pelaksanaan dimulai pada pemutakhiran data pemilih, sampai pada pemungutan suara dan perhitungan suara.

1. Pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih

Pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih dilaksanakan mulai pada awal Januari 2008 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2008, yang dimulai dengan penyerahan daftar pemilih sementara (DPS) oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung ke KPUD Temanggung. Kemudian DPS diserahkan kepada PPK, kemudian dilanjutkan ke PPS untuk dilakukan penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara yang akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Setelah penetapan DPT oleh PPS disampaikan ke PPK untuk direkapitulasi. Selanjutnya PPK menyampaikan ke KPUD. Terakhir, rekapitulasi jumlah pemilih

terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah kabupaten untuk pendistribusian kartu pemilih kepada pemilih.

Pendaftaran peserta pemilih dimaksudkan untuk mengidentifikasi pemilih yang sudah wajib pilih serta yang kategori belum wajib pilih dalam proses pemberian suara. Selain itu, pendaftaran juga dimaksudkan untuk mengantisipasi pemberian suara lebih dari satu kali serta pemberian suara di dua lokasi pemilihan. Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan mulai pertengahan bulan Pebruari 2008 sampai dengan awal bulan April 2008.

2. Pencalonan

Pada tahapan pencalonan dilaksanakan pada akhir bulan Maret sampai dengan minggu ke 3 bulan April 2008. Yang dimulai pada proses pengumuman pendaftaran pasangan calon sampai pada penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dituangkan dalam Keputusan KPUD Temanggung Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Yang Memenuhi Syarat Administrasi Menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2008. Pada akhir April 2008, KPU kabupaten Temanggung menuntaskan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung periode 2008-2013. Acara pengundian berlangsung di halaman kantor KPU Kabupaten Temanggung.

Adapun hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2008, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Calon Bupati/wakil Bupati Kab. Temanggung Tahun 2008

No	Nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati	Partai/Gabungan Partai	Ket
1.	Hasyim Afandi-Budiarto	Golkar, PAN	
2.	Bambang Sukarno-Fuad	PDI-P, PKB	
3.	M.Irfan-Adji	PPP, PKS, Demokrat, PBB	Incumbent

Sumber: KPUD Temanggung, 2008

Berikut ini adalah profil (*Curriculum vitae*) ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2008.

1) Pasangan Calon dengan nomor urut 1

Calon Bupati

Nama : **Drs. H. Hasyim Afandi**
 Tempat tanggal lahir : Temanggung, 1 Juli 1946
 Alamat : Besaran RT.02 RW.12 Parakan Kauman
 Temanggung
 Pekerjaan : Pensiunan
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Status perkawinan : Menikah

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Parakan tahun 1959
2. SMP Al Iman parakan Tahun 1962
3. SMA Negeri Temanggung Tahun 1965
4. IAIN Sunan Kalijaga Tahun 1971

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara IPNU Tahun 1965
2. Ketua Sub Unit Korpri Tahun 1982
3. Wakil Ketua MDI Kab. Temanggung Tahun 1985
4. Wakil Ketua DPD II Golkar Kab. Magelang Tahun 1988.
5. Ketua MUI kab. Temanggung Tahun 2007.

Riwayat Pekerjaan

1. Kasi URAIS Depag Kab. Temanggung
2. Kasubag TU Depag Kab. Temanggung
3. Kakan Depag Kab. Magelang
4. Bupati Kab. Magelang 1999-2004.

Calon Wakil Bupati

Nama : **Ir. H. Budiarto, MT**
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 10 April 1959
Alamat : Perum Srimpi Baru No. 15 Temanggung
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status perkawinan : Menikah

Riwayat Pendidikan

1. SD Xaverius Semarang Tahun 1972
2. SMP St Yoris Semarang Tahun 1975
3. SMA Negeri 1 Semarang Tahun 1979
4. Sarjana Teknik Sipil UNDIP Semarang Tahun 1985
5. Magister Teknik Manajemen Transportasi UNDIP Semarang Tahun 2002.

Pengalaman Organisasi

1. Kabid Olahraga Senat Mahasiswa UNDIP tahun 1982-1984
2. Ketua Umum DPD GAKPI Kab. Temanggung 1990-1996
3. Ketua Umum PENGKAB PRSI Kab. Temanggung Tahun 1992 sd sekarang
4. Kabid IPTEK ICMi Kab. Temanggung Tahun 1994-1998.
5. Perwira Kampanye Pemenangan Pemilu DPD II Golkar Kab. Temanggung Tahun 1996
6. Kabid Kepemudaan DHC Angkatan 45 Kab. Temanggung Tahun 1997
7. Kabid Pendanaan KONI Kab. Temanggung Tahun 2001-2003
8. Dewan Kehormatan PS. Setia Hati Kembang Setaman Kab. Temanggung Tahun 2005

9. Dewan Kehormatan PS. Persaudaraan Setia Hati Teratai Kab. Temanggung Tahun 2007
10. Dewan Pembina ORGANDA Kab. Temanggung Tahun 2006-sekarang
11. Kabid Sarana dan Prasarana Pengda PRSI Prov. Jawa Tengah Tahun 2007-sekarang

Riwayat Pekerjaan

1. Kepala Seksi Bina program DPU Kab. Temanggung tahun 1988-1992
2. Kepala DPU Kab. Temanggung 1992-2003
3. Staf Khusus Bupati Temanggung 2003-2006
4. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab. Temanggung 2006-sekarang.

2) Pasangan Calon dengan nomor urut 2

Calon Bupati

Nama	: Drs. H. M. Bambang Sukarno
Tempat tanggal lahir	: Magelang, 18 Pebruari 1954
Alamat	: Jl. Jendral Sudirman No. 128 Temanggung
Pekerjaan	: Ketua DPRD Kab. Temanggung
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status perkawinan	: Menikah

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Temanggung tahun 1968
2. SMP Negeri 1 Temanggung Tahun 1971
3. SMA Negeri 1 Temanggung Tahun 1974
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pajajaran Bandung Tahun 1983

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Ranting Kertosari dan bakorcam Temanggung PDI Tahun 1993
2. Ketua DPC PDI Pro Mega Tahun 1996
3. Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Temanggung Tahun 1999-2004 dan 2005-2009

Riwayat Pekerjaan

1. Ketua DPRD Kab. Temanggung 1999-2004 dan 2004-2009
2. Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia (ADKASI), dua periode
3. Ketua Umum Pengcab PSSI/PERSITEMA Kaab. Temanggung dua periode

Calon Wakil Bupati

Nama : **Fuad Hidayat, S.Sos**
Tempat tanggal lahir : Temanggung, 1 Januari 1976
Alamat : Desa Krawitan RT. 03 RW. 01 Kec.Candiroto
Temanggung
Pekerjaan : Ketua DPC PKB Kab. Temanggung
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status perkawinan : Menikah

Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Desa Krawitan 1981-1982
2. SD Negeri Krawitan 1982-1988
3. SMP Negeri Ngadirejo 1988-1991
4. SMA Negeri 2 Temanggung 1991-1994
5. S1 FISIP UNDIP Jurusan Administrasi Negara.

Pengalaman Organisasi

1. KIPP Semarang Tahun 1998-1999
2. Ketua Komisi Penalaran Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UNDIP Semarang Tahun 1996-1997
3. Ketua Komisi Penalaran Sehat Mahasiswa FISIP UNDIP Semarang Tahun 1997-1998
4. Ketua PMII Rayon FISIP UNDIP Semarang tahun 1997-1998
5. Sekretariat Pengurus Wilayah Lembaga Dakwah Nadlotul Ulama (PWLDNU) Tahun 1999-2000
6. Anggota Biro Pengkaderan DPW PKB Jawa Tengah tahun 1999-2001
7. Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pengkaderan DPW PKB Jawa Tengah Tahun 2001-2005
8. Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah Tahun 2006
9. Ketua DPC PKB Kab. Temanggung Tahun 2005-2010.

Riwayat Pekerjaan

1. Petani
2. Guru Madrasah Yayasan Manbaul Falah Kyai Rawit Krawitan, Candiroto, Temanggung.

3) Pasangan Calon dengan nomor urut 3

Calon Bupati

Nama : **Drs. H. Mukhamad Irfan**
Tempat tanggal lahir : Temanggung, 3 Agustus 1954
Alamat : Dusun Sepikul RT. 01/02
Mojotengah Kedu Temanggung
Pekerjaan : Bupati Temanggung
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status perkawinan : Menikah

Riwayat Pendidikan

1. SD Mojotengah Kedu Tahun 1966
2. SMP Al Iman Parakan Temanggung Tahun 1969
3. SMA Muhammadiyah Temanggung Tahun 1973
4. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 1981

Pengalaman Organisasi

1. Ketua GP Anshor Kab. Temanggung Tahun 1980-1989
2. Komisaris Kecamatan PPP Tahun 1982-1984
3. Sekretaris DPC PPP Temanggung Tahun 1984-1989
4. Wakil Ketua DPC PPP Temanggung 1989-2000
5. Ketua DPC PPP Temanggung 2000-sekarang

Riwayat Pekerjaan

1. Anggota DPRD Kab. Dati II Temanggung, 1982-1987, 1987-1992, dan 1992-1997
2. Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, 1997-1999
3. Wakil Bupati Temanggung, 2003-2005
4. PLT Bupati Temanggung, 2005-2007
5. Bupati Temanggung 2007-sekarang

Calon Wakil Bupati

Nama : **Drs. M. Setyo Adji, MM**
Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 20 Juni 1951
Alamat : Jl. Dahlia No. 7 Perum Sukosari
Kelurahan Kebonsari Temanggung

Pekerjaan : Pegawai Negeeri Sipil (PNS)
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status perkawinan : Menikah

Riwayat Pendidikan

1. SR Jeruk Legi Cilacap
2. SMPN Banjarnegara Tahun 1967
3. SMEAN Banjarnegara Tahun 1970
4. UNDIP Semarang Tahun 1976
5. UNSOED Purwokerto Tahun 2002.

Riwayat Pekerjaan

1. Pengangkatan CPNS TMT 1979
2. Pengangkatan PNS TMT 1980
3. Pj. Sekretaris Bappeda TMT 1982
4. Pj. Kabag Umum Setda TMT 1982-1983
5. Pj. Camat Bulu TMT 1985
6. Direktur PDAM TMT 1988
7. Kabag Keuangan TMT 1994
8. Asisten III Sekda TMT 1998
9. Ketua Bappeda TMT 2001
10. Sekretaris Daerah TMT 2003-sekarang

Dari profil ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat bahwa ketiga calon Bupati merupakan tokoh politik yang telah berpengalaman. Hasyim pernah menjabat sebagai Bupati Magelang, Bambang Sukarno sebelumnya pernah mencalonkan diri menjadi Bupati Temanggung tahun 2003, dan Mukhamad Irfan sebagai incumbent. Sedangkan untuk calon Wakil Bupati 2 diantaranya adalah PNS yaitu Budiarto yang berpasangan dengan Hasyim, dan Setyo Adji yang berpasangan dengan Irfan. Setyo Adji maupun Budiarto adalah merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Sedangkan Fuad Hidayat adalah tokoh muda yang berpengalaman dalam

organisasi dan intelektual dikalangan Nadliyin. Dengan demikian ketiga pasangan calon merupakan tiga kekuatan yang mampu menarik simpati massa karena figur dan popularitasnya. Sehingga susah diprediksi siapa yang keluar sebagai pemenang. Meskipun akhirnya Hasyim memenangkan perolehan suara tapi selisih suara sangat tipis.

3. Kampanye

Pelaksanaan kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari yaitu mulai tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 18 Juni 2008, dan 3 (tiga) hari sebelum hari H sebagai masa tenang. Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan cara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.

Adapun visi dan misi pasangan calon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Visi misi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Temanggung Tahun 2008

No Urut	Visi Misi
1	<p>Visi: Bersatu Untuk Maju Dan Sejahtera</p> <p>Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kualitas Iman Dan Taqwa Melalui Pembinaan Dan Pengembangan Kehidupan Beragama - Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Ketrampilan Dan Penguasaan IPTEK dalam rangka pengembangan kualitas SDM. - Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada SDA dan SDM. - Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bebas KKN. - Meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.
2	<p>Visi: Temanggung yang beriman, bertaqwa, profesional, adanya kepastian hukum, adil dan sejahtera.</p> <p>Misi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkualitas dan kompetitif melalui pengembangan dan peningkatan pendidikan baik ditingkat

	<p>formal, informal dan non formal yang profesional, mandiri dan berdaya saing dengan berbasis pada potensi dan muatan lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya-sumber daya yang lain berbasis potensi daerah dengan didukung sektor-sektor lain yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. - Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang demokratis, dapat dipercaya, transparan, akuntabel dan profesional yang mendukung peningkatan pelayanan masyarakat yang baik.
3	<p>Visi: Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Madani (Maju, Damai, Agamis Dan Mumpuni)</p> <p>Misi : - Percepatan Pembangunan Perdesaan Dan Daerah Tertinggal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Dan Kesejahteraan Sosial. - Meningkatkan Perekonomian Daerah. - Meningkatkan Peran Generasi Muda Dalam Pembangunan. - Mewujudkan demokratisasi yang berkeadilan. - Mewujudkan masyarakat yang religius. - Mewujudkan tata pemerintahan yang baik. - Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sumber : KPUD Temanggung, 2008

Kampanye pada hari pertama diawali dengan visi misi pasangan calon di DPRD dilanjutkan dengan sosialisasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung berlangsung dengan acara pawai mengelilingi kota Temanggung. Acara ini mampu menyedot ribuan massa yang berasal dari berbagai pelosok desa. Pawai diberangkatkan dari alun-alun kota menuju kantor Telkom dan berputar melewati Pasar Kliwon Temanggung. Urutan pawai disesuaikan dengan urutan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU.

Selain sosialisasi pasangan calon, acara juga dimeriahkan dengan pawai budaya seni budaya lokal, seperti kuda lumping, kubro siswo, warokan, dan lain-lain. Becak dan dokar yang dihiasi aneka macam hiasan warna-warni juga ikut memeriahkan acara pawai. Dalam kesempatan itu Muspida Temanggung juga ikut melakukan pawai dengan menaiki dokar hias.

Acara sosialisasi melalui pawai ini diharapkan akan mengenalkan figur para calon bupati dan wakil bupati kepada masyarakat secara langsung.

Masyarakat juga dapat mengenali para calon melalui visi-misi dan program yang diusung.

Setelah sosialisasi dilanjutkan dengan kegiatan kampanye. Kampanye merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Proses penyelenggaraan kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari mulai tanggal diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon.

Masing-masing pasangan calon diberi waktu selama empat hari untuk berkampanye. Ketiga pasangan calon melaksanakan kampanye secara bergiliran mulai tanggal 6 hingga 17 Juni 2008. Selanjutnya, pada tanggal 18 Juni 2008 KPU Temanggung mengagendakan kegiatan debat publik bagi semua pasangan calon.

Menurut anggota panwas Divisi Pengawasan secara umum semua pasangan calon melakukan pelanggaran aturan kampanye. Pelanggaran tersebut berupa pemasangan spanduk melintang jalan, arak-arakan, kades yang terlibat kampanye, dan mengikutkan anak di bawah umur. Sedangkan menurut Kasat IPP-Intelkam AKP Winarno³⁶ konflik selama masa kampanye nihil karena telah diantisipasi oleh Crisis Center yang beranggotakan 14 orang berasal dari Partai Golkar, PAN, PDI Perjuangan, PKB, PPP, PKS, dan dua personel IPP. "Semua anggota Crisis Center tersebut berupaya melakukan langkah antisipasi guna mencegah munculnya konflik maupun pertikaian. Jadi, kami sudah melangkah

³⁶ Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2008

lebih dulu sehingga mencegah terjadinya ekses berkelanjutan," .Ia mengatakan, tugas dari Crisis Center mengondisikan agar situasi dan kondisi pilkada sekondusif mungkin. Namun, bila ada pelaporan yang mengarah anarkis, hal itu menjadi kewenangan penyidik. Begitu pula, Crisis Center tidak bisa mencampuri penindakan yang ditangani panwas maupun penyidik, katanya.

Kegiatan kampanye dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Temanggung. Adapun kegiatan kampanye masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

**Jadwal Kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati
Pada Pelaksanaan Pilkada Temanggung Tahun 2008**

NO	TANGGAL	PASANGAN CALON	JENIS KAMPANYE	LOKASI
1	1 Juni 2008	3 Pasangan Calon	Pawai Budaya	Kab. Temanggung
2	3 Juni 2008	3 Pasangan Calon	Doa Bersama	Pendopo Pengayoman
3	5 Juni 2008	3 Pasangan Calon	Penyampaian Visi & Misi	DPRD Kab. Temanggung
4	6 Juni 2008	Drs. H. M. Irfan & Drs. H. M. Setyo Adji, MM	Pasangan Calon Dialogis	Gedung Pertemuan Madura Temanggung
5	7 Juni 2008	Drs. M. Bambang Sukarno & Fuad Hidayat, S. Sos	Dialogis	Temanggung
6	8 Juni 2008	Drs. H. Hasyim Afandi & Ir. H. Budiarto, MT	Monologis	Lapangan Gondangwinangun
7	9 Juni 2008	Drs. H. M. Irfan & Drs. H. M. Setyo Adji, MM	Dialogis	Kec. Ngadirejo
8	10 Juni 2008	Drs. M. Bambang Sukarno & Fuad Hidayat, S. Sos	Dialogis	Balai Kelurahan Sidorejo
9	11 Juni 2008	Drs. H. Hasyim Afandi & Ir. H. Budiarto, MT	Dialogis	Kec. Temanggung
10	12 Juni 2008	Drs. H. M. Irfan & Drs. H. M. Setyo Adji, MM	Dialogis	Parakan
11	13 Juni 2008	Drs. M. Bambang Sukarno & Fuad Hidayat, S. Sos	Dialogis	Balai Desa Wonokerso
			Dialogis	Kec. Tembarak
			Dialogis	Gedung Pertemuan Madura Temanggung
			Dialogis	Gedung KUD Jumo
			Dialogis	Kec. Jumo
			Dialogis	Balai Desa Muntung
			Dialogis	Kec. Candioto

12	14 Juni 2008	Drs. H. Hasyim Afandi & Ir. H. Budiarto, MT	Dialogis Dialogis Dialogis	Balai Desa Muntung Kec. Candiroto Gedung Manunggal Parakan Wetan Balai kelurahan Sidorejo
13	15 Juni 2008	Drs. H. M. Irfan & Drs. H. M. Setyo Adjii, MM	Monologis	Lapangan Maron Sidorejo
14	16 Juni 2008	Drs. M. Bambang Sukarno & Fuad Hidayat, S. Sos	Monologis	Kec. Temanggung Temanggung
15	17 Juni 2008	Drs. H. Hasyim Afandi & Ir. H. Budiarto, MT	Monologis	Lapangan Maron Sidorejo Kec. Temanggung
16	18 Juni 2008	3 Pasangan Calon	Debat Publik	Kab. Temanggung
17	19-21 Juni 2008		Minggu Tenang	Persiapan Pencoblosan
18	22 Juni 2008	Pelaksanaan Pemungutan Suara		se Kab. Temanggung

Sumber: Diolah dari Desk Pilkada Kab. Temanggung

Untuk penyelenggaraan kegiatan kampanye tersebut masing-masing pasangan calon memperoleh dana kampanye yang berasal dari uang pribadi maupun sumbangan dari pihak lain baik perorangan maupun institusi tertentu. Dana kampanye masing-masing pasangan calon dilampirkan bersamaan dengan rincian dana dari para penyumbang dan juga melampirkan buku rekening masing-masing pasangan calon. Selanjutnya masing-masing berkas diserahkan kepada KPUD Temanggung untuk selanjutnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Adapun rincian dana kampanye masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

**Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Temanggung
Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008**

No	Pasangan Calon	Sumber Dana	Jumlah
1	Hasyim-Budiarto	Sumbangan Perorangan	282.860.000
		Sumbangan berwujud brg	22.500.000
		Dana pribadi	995.500.000
		Jumlah	1.300.860.000
2	Bambang-Fuad	Dana Pribadi	81.000.000
		Dana dari parpol pengusung	100.000.000
		Jumlah	181.000.000
3	Irfan-Adji	Dana pribadi	619.000.000
		Jumlah	619.000.000

Sumber: Laporan Dana Kampanye Calon Bupati/Wakil Bupati yang diaudit oleh KAP.

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat bahwa dana kampanye terbesar adalah pada pasangan Hasyim-Budiarto. Dana kampanye yang masuk untuk Hasyim-Budiarto berasal dari sumbangan dana para pendukungnya. Sedangkan untuk pasangan Bambang-Fuad dan Irfan-adji dana kampanyenya berasal dari dana pribadi maupun dana dari parpol pengusung. Berdasarkan hasil audit dana kampanye besarnya sumbangan dana yang masuk ke dalam rekening Hasyim-Budiarto adalah Rp 305.360.000. Sejumlah Rp 50.000.000 berasal dari badan hukum swasta dan sisanya sumbangan perorangan sebanyak 13 orang. Dana kampanye tersebut dilaporkan satu hari setelah kampanye berakhir yaitu mulai

tanggal 23-25 Juni 2008. Laporan itu diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya ditempel agar masyarakat bisa ikut memantau.

4. Pemungutan dan perhitungan suara

Pemberian suara adalah kegiatan pemilih memberikan suara dalam bilik pemberian suara dengan cara mencoblos salah satu pasangan dalam surat suara. Untuk memberikan suara dalam Pilkada dibuat suara pemilih dengan memuat nomor, foto dan nama pasangan calon untuk setiap daerah pemilihan. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Temanggung, maka pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2008.

Sebelum pemilih melakukan pencoblosan, maka selambat-lambatnya pukul 06.00 KPPS sudah berada di TPS dengan melakukan tugas: (i) membuka kotak suara; (ii) pengeluaran seluruh isi kotak suara; (iii) mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; (iv) menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. Keseluruhan kegiatan KPPS tersebut, dihadiri oleh pemilih, saksi dari pasangan calon, kemudian dibuatlah berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan 2 (dua) anggota KPPS serta ditandatangani oleh saksi.

Setelah semua prosedur tersebut diatas telah dilaksanakan, maka pemilih pada pilkada diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip nomor urutan kehadiran pemilih. Pada saat pemilihan berlangsung pemilih diberikan surat suara oleh KPPS. Bagi pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS, maka diberi tanda khusus oleh KPPS berupa tinta yang telah ditetapkan oleh KPUD pada salah satu jari tangan.

Setelah melakukan persiapan dan pemungutan suara berakhir, pelaksanaan perhitungan suara dimulai pada pukul 13.00 sampai dengan selesai. Sebelum perhitungan suara dimulai maka KPPS menghitung: (1) jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; (2) jumlah pemilih dari TPS lain; (3) jumlah surat suara yang tidak terpakai dan (iv) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pada saat proses perhitungan suara di TPS pada tanggal 22 Juni 2008 oleh KPPS dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Bagi saksi pasangan calon dalam perhitungan suara harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS.

Setelah penandatanganan berita acara KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksamplar dan memasang sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum. Kemudian KPPS menyerahkan berita, sertifikat hasil perhitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan perhitungan suara kepada PPS setelah perhitungan suara untuk diteruskan ke PPK. Perhitungan Suara dan penyusunan Berita Acara di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 24 Juni s/d 26 Juni 2008. Perhitungan suara di KPU Temanggung dilaksanakan tanggal 29 Juni 2008 di Graha Bhumi Phala Temanggung. Adapun hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2008-2013 pada tabel berikut:

Tabel 3.5

**Komposisi Pemberian Suara pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati
Periode 2008-2013**

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Hasyim Budiarto	Bambang Fuad	Irfan Adji
1	Temanggung	57.726	17.605	15.120	9.640
2	Tlogomulyo	15.754	2.051	6.372	4.401
3	Tembarak	21.027	4.371	6.176	4.993
4	Selopampang	13.634	3.466	3.240	3.843
5	Bulu	33.716	10.480	8.701	7.582
6	Parakan	38.233	17.365	6.368	5.316
7	Kledung	20.025	3.015	7.531	4.630
8	Bansari	17.328	4.618	5.779	3.352
9	Ngadirejo	38.918	10.886	10.203	8.601
10	Candiroto	23.773	4.674	7.297	5.759
11	Wonoboyo	18.318	3.550	5.807	4.404
12	Tretep	14.496	2.812	5.146	3.398
13	Bejen	14.885	2.812	2.590	5.813
14	Jumo	21.683	5.172	5.584	5.726
15	Gemawang	23.404	5.036	5.096	7.321
16	Kedu	40.902	13.450	7.351	9.898
17	Kandangan	36.413	9.500	7.188	9.683
18	Kaloran	33.845	6.462	6.949	10.126
19	Kranggan	34.758	9.152	7.873	7.297
20	Pringsurat	36.194	8.846	7.929	8.595
Jumlah		555.032	145.323	138.300	130.378
Prosentase			35,1	33,4	31,5

Sumber: Diolah dari Desk Pilkada Temanggung, Tahun 2008

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui kemenangan Hasyim-Budiarto sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I meliputi 7 kecamatan yaitu Kecamatan Temanggung, Bulu, Parakan, Ngadirejo, Kedu, Kranggan dan Pringsurat. Pasangan Bambang-Fuad unggul di 7 kecamatan yakni Tlogomulyo, Tembarak, Kledung, Bansari, Candiroto, Wonoboyo, dan Tretep. Pasangan Irfan-Adji unggul di 6 kecamatan yaitu Selopampang, Bejen, Jumo, Gemawang, Kandangan dan Kaloran. Hastim-Budiarto menang mutlak di kecamatan Parakan dan Kedu. Dengan demikian Hasyim unggul di tempat asalnya yakni Kedu.

Demikian juga halnya dengan Fuad yang unggul di tempat asalnya yakni Kecamatan Candirotto.

Selanjutnya hasil perhitungan suara, maka pasangan Hasyim-Budiarto terpilih sebagai Bupati/Wakil Bupati Temanggung periode 2008-2013. Pasangan terpilih ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-497 dan Nomor 132.33-497 Tahun 2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

C. Tahapan Penyelesaian

Setelah seluruh tahapan pelaksanaan selesai, maka tahap terakhir atau tahap penyelesaian, penerimaan laporan dana kampanye oleh KPUD Temanggung dari masing-masing pasangan calon. Kemudian penyerahan laporan dana kampanye ke Akuntan Publik. Proses terakhir dari tahapan ini adalah penyampaian laporan pelaksanaan Pemilu Bupati/Wakil Bupati oleh KPUD Temanggung kepada KPU Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Sekretaris KPUD Temanggung Wintarso Saputro, MM³⁷ secara keseluruhan penyelenggaraan pilkada pelaksanaan pilkada Temanggung berlangsung dalam iklim kondusif, berjalan lancar tidak terdapat kisruh apapun mulai dari pemutakhiran data pemilih sampai pada pemungutan suara, semua dilaksanakan secara transparan baik disaksikan oleh masyarakat, panwas, maupun dari pihak keamanan. Selain itu, sikap *legowo* yang ditunjukkan pasangan calon, baik pihak yang kalah maupun yang menang, semakin mengindikasikan bahwa

³⁷ Hasil wawancara tanggal 8 Januari 2009

Temanggung pantas menjadi salah satu rujukan bagi daerah lain dalam tataran penyelenggaraan pilkada dan partisipasi masyarakat.

Menurut Ali Mufiz yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada saat waktu itu³⁸, agenda pemilihan di Kabupaten Temanggung pada 22 Juni 2008 unik dan spesifik. Pada saat bersamaan, masyarakat temanggung memilih dua pemimpin daerah dengan level yang berbeda, yang satu gubernur, yang satu bupati, masing-masing lengkap dengan wakilnya. Meskipun pelaksanaan pilkada dan pilgub untuk Kabupaten Temanggung dilaksanakan bersamaan namun semua proses pilkada berjalan lancar, karena sudah dipersiapkan jauh hari sebelum waktu pelaksanaan. Selain itu pula pelaksanaan yang bersamaan ini bisa menghemat anggaran anggaran pembiayaan APBD sehingga jauh dari kesan boros dalam penyelenggaraan Pilkada 2008 (*high cost democracy*). Dimana APBD Provinsi membiayai sebesar Rp 4.769.250.679 (empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang dianggarkan dari APBD Provinsi. Sedangkan dari APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 5.192.235.085 (lima milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah). Dengan demikian dana penyelenggaraan pilkada diperoleh dari dua level pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Sementara itu, panitia pelaksana pemilihan juga bisa digabung,. Dari level Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS, Panitia Pemilihan

³⁸Lihat Kesiapan KPU Kab. Temanggung dalam Pemilu Bupati dan wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Disampaikan dalam rapat Koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah

Kecamatan, sampai Panitia Pengawas dari tingkat kecamatan sampai kabupaten. Satu orang dengan dua tugas, jelas lebih efektif. Karena pekerjaannya, honornya juga menyesuaikan. Namun besarnya jauh lebih irit jika masing-masing agenda pemilihan baik pilbup dan pilgub dilaksanakan secara terpisah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Penelitian tentang partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Temanggung ini meliputi 20 kecamatan se Kabupaten Temanggung. Berdasarkan jawaban responden yang diperoleh dari lokasi penelitian dapat diketahui gambaran umum partisipasi politik masyarakat Kabupaten Temanggung

A. Identitas Responden

Data identitas responden dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai obyek yang diteliti: jenis kelamin, usia, status, dan agama.

Berdasarkan data identitas responden dapat dilihat bahwa responden laki-laki lebih banyak daripada responden perempuan. Dari 243 responden, 125 orang (51,44%) diantaranya adalah laki-laki dan 118 orang (48,56%) responden perempuan. Sedangkan untuk kelompok usia didominasi oleh usia 20-29 tahun sebanyak 95 orang (39,1%) dan usia ≤ 19 tahun paling sedikit yakni hanya 9 orang (3,70%). Responden yang sudah kawin merupakan responden terbanyak yakni sekitar 78,60% dan responden yang berstatus janda/duda merupakan responden dengan persentase terkecil yakni sebesar 3,3% atau sebanyak 8 orang. Responden yang beragama Islam jumlahnya terbesar yakni sebanyak 233 orang (95,9%), Kristen Katholik sebanyak 3 orang (1,2%) dan Protestan sebanyak 7 orang (2,9%).

B. Partisipasi Politik

Partisipasi masyarakat Temanggung dalam proses pilkada dapat dilihat dalam keikutsertaan masyarakat pada proses pemungutan suara.

Tabel 4.1

Keikutsertaan dalam pemungutan suara

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya, datang dengan kesadaran sendiri	232 orang	95,47
2	Ya, datang dengan ajakan orang lain	6 orang	2,47
3	Tidak datang ke TPS	5 orang	2,06
	Jumlah	243 orang	100

Data diolah dari kuesioner

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden yang datang ke TPS dengan kesadaran sendiri sebanyak 232 orang (95,47%), yang datang ke TPS dengan ajakan orang lain sebanyak 6 orang (2,47%) dan yang tidak datang ke TPS sebanyak 5 orang (2,06%). Sedangkan pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa kedatangan masyarakat ke TPS apakah menggunakan hak suara atau hanya sekedar datang saja. Alasan yang bersangkutan, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang responden adalah karena tidak enak atau "*ewuh*" dengan lingkungan sekitarnya. Seorang informan mengatakan, " Saya datang ke TPS dan nyoblos karena tidak enak dengan tetangga meskipun saya bingung milih". Meskipun demikian, antusias masyarakat pada saat pencoblosan tergolong tinggi, hal ini dapat dilihat dari persentase kehadiran dan pada saat pemungutan suara sebesar 81,03% dari total pemilih di Temanggung.

Tabel 4.2

Menggunakan hak suara/mencoblos

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mencoblos	231 orang	97,05
2	Tidak menyoblos	7 orang	2,95
	Jumlah	238 orang	100

Data diolah dari kuesioner

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 238 orang responden yang datang ke TPS sebesar 97,05% yang mencoblos, hanya 2,95% yang tidak nyoblos. Seorang informan mengatakan *"nyoblos ora nyoblos podo wae ora kacek"* (Artinya nyoblos tidak nyoblos sama saja tidak ada bedanya). Sedangkan informan yang lain mengatakan *"kulo mboten ngertos kaleh calon niku, dados kulo mboten nyoblos, nek kulo ngertos kaleh calonipun ngih nyoblos"* (saya tidak kenal/tidak tahu siapa calon yang dicoblos makanya tidak nyoblos, kalau saya tahu siapa calonnya ya saya nyoblos). Masyarakat masih menganggap bahwa calon yang mereka pilih adalah benar-benar bisa memenuhi janji-janjinya pada waktu kampanye.

C. POPULARITAS CALON

Seperti yang diuraikan pada bab II bahwa ketiga pasangan calon adalah orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat. Sebagian informan mengatakan "jikapun kampanye tidak diadakan masyarakat juga sudah mengetahui pasangan calon". Kondisi ini tidak lepas dari kebiasaan masyarakat Temanggung yang sangat peduli terhadap orang-orang disekelilingnya sehingga mudah bagi mereka untuk mengenali seseorang apalagi orang tersebut mempunyai pengaruh

di masyarakat. Ketiga pasangan calon merupakan tokoh yang dekat dengan paguyuban pertembakauan. Temanggung sampai saat ini masih menjadi sentra penghasil tembakau terbesar di Jawa Tengah, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis tembakau mendapat perhatian dari masyarakat Temanggung.

Untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat pengetahuan masyarakat tentang pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Tingkat pengenalan terhadap pasangan calon Bupati/Wakil Bupati

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kenal	197 orang	81,07
2	Tidak kenal	20 orang	8,23
3	Tidak menjawab	26 orang	10,7
	Jumlah	243 orang	100

Data diolah dari kuesioner

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden, sebesar 81,07% kenal dengan pasangan calon, sedangkan 20 orang (8,23%) tidak kenal pada pasangan calon dan 10,7% tidak menjawab. Dan mereka sudah kenal pasangan calon jauh sebelum masa kampanye seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Waktu pengenalan terhadap pasangan calon

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sebelum kampanye	133	54,73
2	Saat kampanye	54	22,22
3	Saat pencoblosan	10	4,12
4	Tidak menjawab	46	18,93
	Jumlah	243	100

Data diolah dari kuesioner

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebanyak 133 responden (54,73%) kenal pasangan calon sebelum kampanye, 54 orang (22,22%) mengenal pasangan calon pada saat kampanye, 10 orang mengenal pasangan calon pada saat pencoblosan, dan 46 orang responden (18,93%) tidak menjawab. Mayoritas dari responden menjawab mengenal pasangan calon sebelum masa kampanye.

Salah seorang responden dari kecamatan Parakan mengatakan "Pak kiyai Hasyim gak kampanye saja pasti warga sekitar sudah kenal dengan beliau". Responden yang lain mengatakan "Hampir setiap minggu beliau mengisi acara pengajian disini dan warga sekitar sini sangat menghormati dan segan pada beliau". Perkataan dari informan ini menunjukkan bahwa sosok kiyai merupakan tokoh yang dikenal dan disegani dimasyarakat. Dimata masyarakat seorang kiyai merupakan seorang "pemimpin" bagi masyarakat. Kemudian dari pertanyaan kepada responden dapat pula diketahui pasangan calon yang paling dikenal/diketahui masyarakat seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Pasangan calon yang dikenal masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Hasyim-Budiarto	113	46,50
2	Bambang-Fuad	31	12,76
3	Irfan-Adji	53	21,81
	Tidak menjawab	46	18,93
	Jumlah	243	100

Data diolah dari kuesioner

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui jawaban responden dari ketiga pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, pasangan Hasyim-Budiarto berada pada posisi paling populer yakni sebesar 46,50%, disusul pasangan Adji-Irfan 21,81% dan pasangan Bambang-Fuad 12,76%. Meskipun hasil pilkada menunjukkan perolehan suara Bambang-Fuad berada pada urutan kedua setelah Hasyim-Budiarto, dan Irfan-Adji pada urutan ketiga. Tabel di atas juga menunjukkan ada sebagian responden (18,93%) mengaku tidak kenal pada semua pasangan calon sehingga mereka tidak memberikan jawaban.

D. STATUS SOSIAL EKONOMI

Untuk variabel status sosial ekonomi dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan responden.

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Pendidikan yang diikuti responden

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sarjana (S1/S2)	50	20,58
2	SMA	73	30,04
3	SMP	100	41,15
4	SD/Buta huruf	20	8,23
	Jumlah	243	100

Data diolah dari kuesioner

Dari hasil jawaban responden pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan mereka adalah SMA dan SMP yang bisa juga digolongkan untuk tingkat menengah (sedang), yakni sebanyak 173 responden (71,19%), sedangkan tingkat pendidikan tinggi yaitu S1/S2 sebanyak 50 orang (20,58%) dan pendidikan rendah yaitu SD dan Buta huruf sebanyak 20 responden (8,23%). Dengan demikian mayoritas responden berpendidikan sedang (SMP/SMA).

2. Pekerjaan

Jenis pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Jenis Pekerjaan Responden

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	PNS	40	16,46
2	Wiraswasta	83	34,16
3	Buruh	38	15,64
4	Petani	62	25,51
5	Lainnya	20	8,23
	Jumlah	243	100

Data diolah dari kuesione

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa sebesar 34,16% responden bekerja sebagai wiraswasta, sedangkan yang bekerja sebagai petani sebesar 25%, PNS sebesar 16% , buruh 15%, dan lainnya termasuk pelajar dan ibu rumah tangga sebesar 8%. Beragamnya jenis pekerjaan responden menggambarkan populasi bahwa dilingkungan masyarakat terdiri dari beragam jenis penduduk. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di pegunungan seperti pada Kecamatan Kledung dan Kecamatan Tretap berprofesi sebagai petani, sedangkan responden yang tinggal dekat dengan pusat pemerintahan kebanyakan berprofesi sebagai PNS dan wiraswasta. Profesi sebagai buruh pabrik ditemukan pada sebagian responden, karena memang di Temanggung terdapat beberapa pabrik seperti pabrik kayu lapis, maupun tembakau.

3. Pendapatan

Pendapatan yang diperoleh oleh responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Pendapatan Responden

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	< Rp 600.000	91	37,45
2	Rp 600.001-1.000.000	58	23,87
3	Rp 1.000.001-1.500.000	40	16,46
4	Rp 1.500.000-2.000.000	19	7,82
5	> Rp 2.000.000	25	10,29
6	Tidak menjawab	10	4,11
		243	100

Data diolah dari kuesioner

Dari tabel 4.8 diketahui bahwa pendapatan responden < Rp 600.000 sebesar 37,45%. Ini menunjukkan tingkat pendapatan responden masih tergolong

rendah. Responden yang berpenghasilan tinggi yaitu diatas 1.000.000 hanya sebesar 34,57%. Dari 243 responden sebanyak 233 (95,88%) yang memiliki penghasilan, sedangkan sisanya sebanyak 10 (4,12%) responden tidak mempunyai penghasilan karena berstatus sebagai pelajar maupun ibu rumah tangga.

E. Kondisi sosial politik

Kehidupan masyarakat Temanggung masih menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi kepedulian sosial. Kegiatan seperti pengajian ataupun yasinan dan ritual keagamaan lainnya masih dipegang teguh oleh masyarakat Temanggung. Budaya "ewuh pakewuh" masih sangat kental. Warga masyarakat yang tidak aktif dalam kegiatan sosial biasanya akan mendapat "sanksi sosial" di masyarakat. Sehingga warga yang tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial akan merasa dikucilkan. Kondisi sosial politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9

Kegiatan Sosial yang diikuti oleh Responden

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pengajian	99	30,37
2	Posyandu	35	10,74
3	Selapanan RT/RW	107	32,82
4	Arisan PKK RT/RW	70	21,47
5	Lainnya	15	4,60
	Jumlah	326	100

Data diolah dari kuesioner

Dari jawaban responden pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa aktivitas sosial yang paling banyak diikuti adalah kegiatan Selapanan RT/RW sebesar 32,82%,

Pengajian 30,37%, Arisan RT/RW 21,47%, Posyandu 10,74%, Kegiatan lainnya 4,60%. Sebagian besar dari responden mengikuti beberapa kegiatan sosial. Selapanan RT/RW biasanya membicarakan kegiatan-kegiatan yang akan diadakan di RT/RW. Tiap-tiap warga yang mengikuti selapanan diminta masukannya untuk pelaksanaan kegiatan di RT/RW. Untuk kegiatan pengajian biasanya diadakan rutin seminggu sekali. Pengajian ini masih merupakan kegiatan yang paling banyak diikuti oleh warga masyarakat. Kegiatan yang lain seperti arisan PKK RT/RW biasanya dilaksanakan sebulan sekali oleh ibu-ibu. Arisan merupakan silaturahmi antar warga yang kadang tidak dapat bertemu pada hari-hari biasa. Posyandu juga merupakan bagian dari kegiatan ibu-ibu PKK yaitu berupa kegiatan penimbangan bayi, pemberian makanan tambahan dan informasi penting tentang kesehatan ibu dan anak yang biasanya diadakan sebulan sekali dengan mendatangkan tenaga medis dari puskesmas setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau tumbuh kembang anak balita. Sebagian dari ibu-ibu anggota PKK adalah juga merupakan kader dari posyandu. Seorang ibu mengatakan "di desa ini kalau tidak pernah ikut kegiatan RT/RW biasanya akan dijauihi oleh warga karena mereka dianggap tidak peduli dengan lingkungannya". Lebih lanjut ia menambahkan "Orang tersebut sering jadi bahan omongan dan bahkan seringkali dikucilkan dari lingkungannya".

Selanjutnya peran responden dalam kegiatan kampanye dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Peran Responden dalam kampanye pilkada

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sebagai pelaksana parpol	44	18,11
2	Sebagai simpatisan	182	74,89
3	Tidak terlibat	17	7,0
	Jumlah	243	100

Data diolah dari kuesioner

Dari tabel 4.10 dapat diketahui peran responden dalam kegiatan kampanye pilkada yang dilakukan 3 pasang calon Bupati/wakil Bupati. Sebesar 93% responden mengaku sebagai simpatisan dan pelaksana parpol (dalam hal ini dikategorikan terlibat dalam kampanye), dan sisanya sebanyak 17 orang (7,0%) memberikan jawaban tidak ikut/tidak terlibat kegiatan kampanye. Seorang responden yang tidak terlibat dalam kegiatan kampanye mengatakan "Saya tidak ikut kampanye karena kampanye tidak akan merubah pilihan karena sebelum kampanye saya sudah punya pilihan sendiri". Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa ada responden yang telah mempunyai pilihan sebelum masa kampanye dimulai.

Sedangkan status responden dalam kegiatan kampanye diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.11

Status Responden dalam kampanye pilkada

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sebagai Pengurus/Koordinator	52	21,4
2	Sebagai anggota	137	56,38
3	Tidak terlibat	54	22,22
	Jumlah	243	100

Data diolah dari kuesioner

Dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa mayoritas dari responden sebesar 77,78% berstatus sebagai koordinator dan anggota (dalam hal ini dikategorikan terlibat dalam kampanye pilkada). Sedangkan yang tidak terlibat sebesar 22,22%. Hal ini menunjukkan bahwa responden aktif dalam kegiatan kampanye.

Seorang responden mengatakan bahwa masyarakat cukup antusias dalam kegiatan kampanye. Mereka beranggapan bahwa kegiatan kampanye sebagai suatu hiburan apalagi bagi responden yang tinggal dipelosok. Ada juga responden tertarik ikut kampanye karena banyak yang menonton. Seorang responden mengatakan, "Saya tertarik ikut kampanye karena ada hiburannya selain itu juga bisa bertemu dengan teman-teman maupun saudara-saudara". Responden lain menyebutkan bahwa ada juga masyarakat yang tidak ikut kampanye karena merasa hanya buang-buang waktu saja sebab tanpa kampanye mereka sudah punya pilihan sendiri. Apalagi bagi mereka yang telah mempunyai kesibukan sendiri.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pilkada, peran warga juga merupakan faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan pilkada. Responden yang ikut berperan dalam persiapan pelaksanaan pilkada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Peran Responden dalam persiapan pelaksanaan pilkada

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sebagai KPPS	105	43,21
2	Sebagai petugas keamanan	80	32,92
3	Lainnya	58	23,87
	Jumlah	243	100

Data diolah dari kuesioner

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui responden yang bertugas sebagai KPPS sebesar 43,21%, Petugas Keamanan 32,82%, dan responden lainnya yang sebagian ibu-ibu terlibat sebagai seksi konsumsi yang menyediakan makanan bagi petugas KPPS, dan sebagian lainnya sebagai petugas kebersihan. Responden lainnya menjawab tidak terlibat dalam persiapan pelaksanaan pilkada hanya sebagai pemilih saja. Keaktifan masyarakat dalam persiapan pelaksanaan pilkada dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat sebagai sukarelawan dalam pilkada. Begitu juga dengan para ibu-ibu yang aktif dalam kegiatan PKK secara sukarela ikut membantu menyediakan konsumsi maupun membantu membersihkan lokasi tempat pemungutan suara.

Peran serta masyarakat dalam proses politik juga dapat dilihat dari kegiatan pilkades yang telah diadakan sebelum proses pilkada dimulai. Bahkan pada pelaksanaan pilkades bulan Juni 2007 dilaksanakan serentak di 227 desa se Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan pilkades berjalan lancar, walaupun masih terdapat juga kekeliruan perhitungan suara maupun isu politik uang dan penggunaan ijazah palsu. Kondisi seperti ini memang suatu hal yang lumrah terjadi. Namun semua pelanggaran dapat diatasi. Sehingga boleh dikatakan pelaksanaan pilkades ini juga bisa dijadikan cerminan pelaksanaan pilkada. Berikut ini jawaban responden dalam pertanyaan tentang penggunaan hak suara dalam pilkades.

Tabel 4.13
Keikutsertaan responden dalam pilkades

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya, mencoblos	230	94,65
2	Tidak mencoblos	13	5,35
	Jumlah	243	100

Data diolah dari kuesioner

Dari tabel 4.13 dapat dilihat responden yang mencoblos dalam pilkades mendominasi jawaban sebesar 94,65%, yang tidak mencoblos 5,35%. Hal ini menunjukkan bahwa responden berpartisipasi tinggi dalam pencoblosan pilkades.

Dalam lingkungan masyarakat Temanggung pertemuan antar warga kerap dilaksanakan. Kegiatan ini berjenjang mulai dari lingkungan yang terkecil RT, RW, dusun dan desa. Materi yang dibicarakan dalam rapat-rapat tersebut bermacam-macam. Mulai dari kehidupan sehari-hari masyarakat bahkan sampai kegiatan pembangunan. Bahkan pertemuan-pertemuan informal seperti ini merupakan wadah aspirasi masyarakat yang bisa disampaikan ke forum resmi seperti kecamatan sampai ke kabupaten. Rapat RT/RW maupun rembuk dusun/desa ini biasanya dilaksanakan di rumah warga yang bergiliran setiap bulannya. Dan bahkan terkadang jika rumah warga yang tergolong sempit sehingga kondisinya tidak memungkinkan untuk rapat maka diadakan di Bale RT/RW maupun di Balai Desa. Dan setelah semua masalah ataupun kegiatan selesai dirembug maka akan disampaikan ke forum resmi di tingkat desa yakni yang biasa disebut Musrenbangdes, yang kemudian berjenjang ditingkat kecamatan sampai kabupaten yang kemudian nantinya akan ditindaklanjuti oleh

Pemerintah. Aktivitas masyarakat ini dapat dilihat dari distribusi jawaban responden berikut:

Tabel 4.14
Peran responden dalam kegiatan rapat Rembug Dusun/Desa

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ketua	35	14,40
2	Anggota	187	76,95
3	Tidak terlibat	21	8,65
	Jumlah	243	100

Data diolah dari kuesioner

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui mayoritas responden sebesar 91,35% terlibat dalam kegiatan rapat (yang berperan sebagai ketua dan anggota). Sedangkan yang tidak terlibat dalam kegiatan rapat rembug dusun/desa hanya sebesar 8,65%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden aktif dalam kegiatan rapat rembug dusun/desa. Kegiatan rembug desa/dusun merupakan kegiatan yang merupakan suatu rutinitas dilingkungan masyarakat yang masih memegang teguh sistem kekerabatan sosial.

Selanjutnya jenis kegiatan rapat yang diikuti oleh responden dapat dijelaskan pada tabel berikut:”

Tabel 4.15
Kegiatan Rapat yang dihadiri responden

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Rapat Rembug desa/dusun	105	38,89
2	Rapat RT/RW	131	48,52
3	Lainnya	34	12,59
	Jumlah	270	100

Data diolah dari kuesioner

Pada tabel 4.15 dapat dilihat kegiatan rapat yang diikuti oleh responden. Sebagian responden selain mengikuti Rapat rembug desa/dusun juga mengikuti rapat RT/RW. Rapat yang paling banyak diikuti responden adalah rapat RT/RW karena memang lingkup yang paling dekat dengan keseharian masyarakat. Kegiatan RT/RW dilaksanakan rutin setiap bulan.

Selanjutnya dari kegiatan rapat yang diikuti oleh responden, dapat pula dilihat kehadiran responden yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Frekuensi kehadiran responden dalam kegiatan rapat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya, selalu	111	45,68
2	Ya, kadang-kadang	123	50,62
3	Tidak pernah	9	3,70
	Jumlah	243	100

Data diolah dari kuesioner

. Tabel 4.16 menunjukkan bahwa frekuensi kehadiran responden yang selalu hadir dalam setiap rapat sebesar 45.68%, yang kadang-kadang hadir 50.62%, dan yang tidak pernah hadir 3.70%. Responden yang tidak hadir mengatakan bahwa mereka sibuk bekerja sehingga tidak mempunyai waktu luang untuk mengikuti kegiatan rapat. Responden yang selalu hadir dalam rapat biasanya adalah orang-orang yang secara aktif memberikan sumbangsihnya dalam rapat. Dalam masyarakat Temanggung jika ada warga yang tidak hadir dalam setiap kegiatan tanpa ada alasan yang jelas bisa menjadi omongan di dalam masyarakat. Seorang responden di kecamatan Bejen mengatakan ”Kegiatan rapat-

rapat dilingkungan kami sepertinya sudah merupakan suatu rutinitas yang telah membudaya, sehingga bila ada warga yang tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas dianggap tidak peduli dengan lingkungannya sendiri”. Menurut responden tersebut ada sanksi sosial di masyarakat jika tidak aktif dalam kegiatan di lingkungannya. Jika ada kegiatan atau ada warga yang mempunyai hajatan mereka biasanya tidak pernah dilibatkan. Oleh karenanya sistem kekerabatan sosial masih melekat kuat pada masyarakat Temanggung.

BAB V

ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK DALAM PILKADA

Hasil penelitian sebagaimana yang telah dijabarkan pada Bab IV yang diolah berdasarkan jawaban dari responden dan wawancara dengan informan, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada maupun dalam kehidupan dilingkungan berlangsung kondusif. Tingkat partisipasi yang tinggi dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan sosial politiknya. Dalam kegiatan rapat-rapat terutama yang berada dilingkup RT/RW, sebagian besar masyarakat terlibat secara langsung. Meskipun demikian ada juga yang sebagian kecil yang tidak terlibat, namun secara keseluruhan peran serta masyarakat tinggi.

Analisis lanjutan guna mengkaji variabel partisipasi adalah melalui uji hubungan antara variabel-variabel yang dimasukkan dalam variabel independen dengan variabel partisipasi politik dalam pilkada.

Alat analisis yang digunakan adalah tabel silang dan korelasi produk momen kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Melalui distribusi penyebaran dalam tabel silang ini dan uji hipotesa akan dilihat apakah hipotesa yang dirumuskan dalam penelitian ini berlaku di wilayah penelitian. Hipotesa tersebut adalah terdapat hubungan positif antara variabel-variabel popularitas calon, status sosial ekonomi dan kondisi sosial politik dengan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

A. HUBUNGAN POPULARITAS CALON DENGAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Analisis terhadap variabel popularitas calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dimulai dengan analisis tabel silang pada masing-masing komponen variabel popularitas calon, yaitu tingkat pengetahuan terhadap calon, kapan saat mengenal calon dan siapa calon yang paling dikenal. Analisis ini dilanjutkan dengan analisis korelasi produk momen terhadap variabel popularitas calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk melihat adanya kekuatan hubungan serta signifikan tidaknya hubungan tersebut. Tahap-tahap analisis ini juga dilakukan terhadap variabel independen yang lain, yakni diawali dengan tabel silang dan dilanjutkan dengan analisis korelasi produk momen.

1. Hubungan antara tingkat pengenalan calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah

Tingkat pengenalan/pengetahuan masyarakat terhadap pasangan calon menyiratkan bahwa makin kenal/tahu tentang calon maka akan berbeda partisipasinya dengan yang tidak kenal/tidak tahu tentang pasangan calon.

Perbedaan tingkat pengetahuan/pengenalan terhadap pasangan calon dalam penelitian ini diduga mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Dari jawaban responden diketahui bahwa ada variasi tingkat pengetahuan terhadap pasangan calon sebanyak 197 orang (81,07%) mengenal pasangan calon, 20 orang (8,23%) tidak mengenal pasangan calon dan sebanyak 26 orang (10,7) tidak memberikan jawaban. Pada tabel berikut ini akan dilihat

apakah ada hubungan positif antara variabel tingkat pengenalan terhadap pasangan calon dengan partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Temanggung.

Tabel 5.1

Pengenalan/pengetahuan terhadap pasangan calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pilkada di Temanggung

Pengenalan	Partisipasi		Total
	Rendah	tinggi	
Tidak kenal	6 (30%)	14 (70%)	20 (100%)
Kenal	6 (3%)	191 (97%)	197 (100%)
Total	12 (6%)	205 (94%)	217 (100%)

Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa mereka yang kenal calon lebih berpartisipasi (97%:70%) dibanding yang tidak kenal calon (30%;3%) Mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang mengenal calon sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal dari responden yang tidak kenal calon. Dengan demikian pada penelitian ini terdapat hubungan positif antara pengenalan terhadap pasangan calon dan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

2. Hubungan antara waktu pengenalan terhadap pasangan calon dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah

Masih berkaitan dengan pengenalan terhadap pasangan calon, waktu pengenalan terhadap pasangan calon diduga mempunyai pengaruh terhadap partisipasi politik dalam pilkada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2

Waktu Pengenalan terhadap pasangan calon dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah

Waktu pengenalan	Partisipasi		Total
	Rendah	tinggi	
Saat pencoblosan	10 (100%)	0 (0%)	10 (100%)
Saat kampanye	6 (11%)	48 (89%)	54 (100%)
Sebelum kampanye	2 (2%)	131 (98%)	133 (100%)
Total	18 (9%)	179 (91%)	197 (100%)

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa responden yang mengenal calon sebelum masa kampanye lebih berpartisipasi (98%:89%:0%) dibanding yang mengenal calon pada saat pencoblosan (100%:11%:2%). Mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang mengenal calon sebelum masa kampanye sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal dari responden yang mengenal calon pada saat pencoblosan. Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat hubungan positif antara waktu pengenalan terhadap

pasangan calon dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah.

Kesimpulan dari analisis di atas adalah bahwa (1) ada hubungan positif antara pengenalan terhadap pasangan calon dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah, (2) ada hubungan positif antara waktu pengenalan terhadap pasangan calon dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara popularitas calon dan partisipasi politik dalam pilkada.

Sedangkan hasil analisis korelasi produk momen dengan menggunakan perhitungan statistik SPSS 17.0 mengenai variabel popularitas calon yang dikaitkan dengan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah, menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,203, r hitung pada taraf uji 0,01 dan $N= 243$ adalah 0,203, sedangkan r tabel 0,1650, sehingga r hitung $> r$ tabel atau $0,203 > 0,1650$. Ini berarti bahwa korelasi antara popularitas calon dan partisipasi politik dalam pilkada adalah signifikan pada taraf kepercayaan 99%.

Berdasarkan hasil analisis statistik diatas, maka hipotesa yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu ada pengaruh yang signifikan antara popularitas calon dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah diterima. Kedekatan masyarakat terhadap pasangan calon maupun pengetahuan masyarakat terhadap pasangan calon juga mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat lebih optimis terhadap pilihan mereka jika pasangan calon yang dipilih adalah tokoh yang mereka ketahui/mereka kenal.

B HUBUNGAN STATUS SOSIAL EKONOMI DAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Dalam penelitian ini variabel status sosial ekonomi adalah salah satu variabel yang diduga mempunyai hubungan dengan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah. Diduga mereka yang status sosial ekonominya tinggi maka akan mempunyai partisipasi politik yang tinggi pula.

Analisis terhadap variabel status sosial ekonomi dan partisipasi politik dalam pilkada dimulai dengan komponen variabel status sosial ekonomi yang penting, yaitu pendidikan, dan penghasilan. Analisis ini dilanjutkan dengan analisis korelasi produk momen terhadap variabel status sosial ekonomi dan partisipasi politik dalam pilkada.

1. Hubungan pendidikan dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah

Perbedaan tingkat pendidikan seseorang, dalam penelitian ini diduga mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi responden. Pada masyarakat Temanggung terdapat variasi tingkat pendidikan yang terwakili oleh responden yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu ada sebanyak 50 responden berpendidikan tinggi, 173 berpendidikan sedang/menengah, dan 20 responden berpendidikan rendah. Pada tabel berikut akan dilihat apakah ada hubungan yang positif antara variabel pendidikan dan partisipasi politik dalam pilkada

Tabel 5.3

Pendidikan dan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah

Tk. Pendidikan	Partisipasi		Total
	rendah	tinggi	
Rendah	0 (0%)	20 (100%)	20 (100%)
Sedang	9 (5%)	164 (95%)	173 (100%)
Tinggi	3 (6%)	47 (94%)	50 (100%)
Total	12 (5%)	231 (95%)	243 (100%)

Dari tabel 5.3 terlihat bahwa responden yang berpendidikan rendah lebih berpartisipasi (100%:95%:94%), dibanding yang berpendidikan tinggi (6%:5%:0%). Mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang pendidikannya rendah sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal dari responden yang pendidikannya tinggi. Dengan demikian pada penelitian ini terdapat hubungan negatif antara tingkat pendidikan dan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada. Hal ini sejalan dengan pendapat Huntington pada bab I tentang polling di India bahwa mereka yang berpendidikan tinggi tidak tertarik ikut kegiatan pemilihan.

2. Hubungan Tingkat Pendapatan dan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dalam penelitian ini diduga ada juga hubungan positif antara pendapatan dan partisipasi politik dalam pilkada., yaitu mereka yang mempunyai pendapatan tinggi cenderung mempunyai tingkat partisipasi tinggi. Seperti yang kita ketahui,

kekayaan adalah salah satu sumber kekuasaan. Orang-orang yang mempunyai dana yang besar cenderung mempunyai ruang partisipasi yang lebih besar dari orang-orang yang kurang mampu.

Dalam penelitian ini perbedaan antara kategori pendapatan rendah dan tinggi diukur dari jumlah uang/gaji yang diterima responden dalam sebulan. yang termasuk dalam kategori pendapatan rendah adalah mereka yang berpenghasilan < Rp 600.000, yang berpenghasilan sedang Rp 600.000-1.000.000, dan yang berpenghasilan tinggi > Rp 1.000.000.

Selanjutnya pada tabel berikut dapat dilihat bagaimana hubungan antara pendapatan dan partisipasi politik dalam pilkada.

Tabel 5.4
Pendapatan dan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pendapatan	Partisipasi		Total
	rendah	tinggi	
Rendah	2 (2%)	89 (98%)	91 (100%)
Sedang	3 (5%)	55 (95%)	58 (100%)
Tinggi	6 (7%)	78 (93%)	84 (100%)
Total	11 (5%)	222 (95%)	233 (100%)

Berdasarkan tabel 5.4 terlihat bahwa responden yang pendapatannya rendah lebih berpartisipasi (98%:95%:93%) dibanding yang pendapatannya tinggi (7%:5%:2%). Dengan kata lain mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang pendapatannya rendah sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal dari responden yang berpendidikan

tinggi. Berdasarkan analisis tabel silang dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pendapatan dan partisipasi politik dalam pilkada.

3. Hubungan SSE dan Partisipasi Politik dalam Pilkada

Salah satu hipotesa dalam penelitian ini adalah SSE mempunyai hubungan/positif terhadap partisipasi politik dalam pilkada. Status sosial ekonomi tersebut dilihat dari tingkat pendidikan dan pendapatan. Sedangkan untuk pekerjaan tidak dapat dibuat dalam tabel silang karena peneliti mengalami kesulitan dalam membuat klasifikasi pekerjaan menurut tingkatan tinggi rendah. Demikian pula dalam memberi skor nilai pada jenis pekerjaan tersebut, yaitu apakah pekerjaan petani lebih tinggi skornya daripada wiraswasta atau sebaliknya.

Tabel 5.5

Status Sosial ekonomi dan Partisipasi Politik dalam Pilkada

Status Sosial Ekonomi	Partisipasi		Total
	rendah	tinggi	
Rendah	7 (5%)	148 (95%)	155 (100%)
Tinggi	6 (7%)	82 (93%)	88 (100%)
Total	13 (5%)	230 (95%)	243 (100%)

Dari tabel 5.5 dapat diketahui bahwa responden yang status sosial ekonominya rendah lebih berpartisipasi (95%:93%) dibanding yang status sosial ekonominya tinggi (7%:5%). Mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal

dari responden yang status sosial ekonominya rendah sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal dari responden yang status sosial ekonominya tinggi. Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat hubungan negatif antara SSE dan partisipasi politik dalam pilkada.

Sedangkan hasil analisis korelasi produk momen dengan perhitungan SPSS 17.0 mengenai variabel SSE dan partisipasi politik dalam pilkada, menunjukkan koefisien korelasi sebesar -0,30, r hitung pada taraf uji 0,05 dan $N = 243$ adalah -0,030, dan r tabel 0,1259, sehingga r hitung $< r$ tabel atau $-0,30 < 0,1259$. Ini berarti bahwa korelasi antara popularitas calon dan partisipasi politik dalam pilkada adalah tidak signifikan pada taraf kepercayaan 95%.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis statistik di atas, maka hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh yang signifikan antara SSE dan partisipasi politik dalam pilkada tidak diterima. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan maupun tingkat pendapatan tidak mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada.

C. HUBUNGAN KONDISI SOSIAL POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Selain variabel popularitas calon dan status sosial ekonomi, yang juga diduga mempunyai hubungan positif terhadap partisipasi politik dalam pilkada adalah kondisi sosial politik. Diduga mereka aktif dalam kegiatan sosial politik mempunyai kesadaran berpartisipasi politik yang lebih tinggi daripada orang yang tidak aktif dalam kegiatan sosial politik. Semakin aktif seseorang dalam kegiatan sosial politik maka semakin tinggi partisipasi politiknya dalam pilkada.

Komponen kondisi sosial politik yang dibuat dalam tabel silang ini adalah peran dalam kampanye, keterlibatan dalam rapat dusun/desa/musrenbang, dan tingkat kehadiran dalam rapaat-rapat tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan responden yang terlibat dalam kegiatan kampanye sebagai simpatisan memiliki persentase yang tertinggi sebesar 74,89%. Untuk melihat hubungan antara peran dalam kampanye dan partisipasi politik dalam pilkada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6

Peran dalam kampanye dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah

Peran dalam kampanye	Partisipasi		Total
	Rendah	tinggi	
Tidak terlibat	4 (23%)	13 (77%)	17 (100%)
Simpatisan	5 (3%)	177 (97%)	182 (100%)
Pelaksana parpol	2 (5%)	42 (95%)	44 (100%)
Total	11 (5%)	232 (95%)	243 (100%)

Berdasarkan tabel 5.6 dapat dilihat bahwa responden yang berperan sebagai simpatisan dan pelaksana parpol lebih berpartisipasi (97%:95%:77%) dibanding yang tidak terlibat kampanye (23%:3%:5%). Simpatisan dan pelaksana partai politik termasuk dalam kategori yang terlibat dalam kampanye. Mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang terlibat dalam kampanye (simpatisan dan pelaksana parpol) sebaliknya yang partisipasinya rendah berasal dari responden yang tidak terlibat dalam kampanye dan pelaksana

parpol . Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat hubungan positif antara peran dalam kampanye dan partisipasi politik dalam pilkada.

Selanjutnya yang juga termasuk dalam variabel kondisi sosial politik adalah keterlibatan dalam rapat RT/RW/dusun/desa/musrenbang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.7

Keterlibatan dalam rapat dusun/desa/musrenbang

Keterlibatan dlm rapat RT/RW/dusun/desa/musrenbang	Partisipasi		Total
	rendah	tinggi	
Tidak terlibat	5 (24%)	16 (76%)	21 (100%)
Anggota	6 (3%)	181 (97%)	187(100%)
Ketua	1 (3%)	34 (97%)	35 (100%)
Total	12 (5%)	231 (95%)	243 (100%)

Dari tabel 5.7 dapat dilihat bahwa responden yang terlibat sebagai ketua dan anggota lebih berpartisipasi (97%:97%:76%) dibanding yang tidak terlibat dalam rapat (24%:3%:3%). Mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang terlibat sebagai ketua dan anggota sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal dari responden yang tidak terlibat dalam rapat RT/RW/dusun/desa/musrenbang. Dengan demikian terdapat hubungan positif antara keterlibatan dalam rapat dusun/desa/musrenbang dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah.

Tabel 5.8
Tingkat kehadiran dalam rapat RT/RW/dusun/desa/musrenbang dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah

Tingkat kehadiran dalam rapat RT/RW/dusun/desa/musrenbang	Partisipasi		Total
	rendah	tinggi	
Tidak pernah	6 (33%)	3(67%)	9 (100%)
Kadang-kadang	6 (5%)	117 (95%)	123(100%)
Selalu	3(3%)	108 (97%)	111 (100%)
Total	15 (6%)	228 (94%)	243 (100%)

Dari tabel 5.8 dapat diketahui bahwa responden yang selalu menghadiri rapat lebih berpartisipasi (97%:95%:67%) dibanding yang kadang-kadang menghadiri rapat dan yang tidak pernah menghadiri rapat. Mereka yang partisipasinya tinggi cenderung berasal dari responden yang selalu menghadiri rapat sebaliknya yang partisipasinya rendah cenderung berasal dari responden yang tidak pernah menghadiri rapat. Dengan demikian terdapat hubungan positif antara tingkat kehadiran dalam rapat RT/RW/dusun/desa/musrenbang dan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah.

Sedangkan hasil analisis korelasi produk momen dengan menggunakan program SPSS 17.0 mengenai variabel kondisi sosial politik dan partisipasi politik dalam pilkada, menunjukkan koefisien korelasi sebesar -0,155 , r hitung pada taraf uji 0,05 dan N= 243 adalah -0,155, dan r tabel adalah 0,1259, sehingga r hitung < r tabel atau -0,155 < 0,1259. Nilai korelasi yang mendekati antara 1 atau -1

berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat³⁹. Berdasarkan perhitungan SPSS 17.00 kondisi sosial politik berkorelasi terhadap partisipasi politik meskipun menunjukkan nilai yang negatif. Ini berarti bahwa ada antara popularitas calon dan partisipasi politik dalam pilkada signifikan pada taraf kepercayaan 95%.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis statistik di atas, maka hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh yang signifikan antara kondisi sosial politik dan partisipasi politik dalam pilkada dapat diterima. Hasil perhitungan SPSS 17.0 ini menunjukkan bahwa kondisi sosial politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik dalam pilkada.

D. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen (X_1, X_2, X_3) dengan variabel dependen (Y) apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Adapun hasil analisis regresi linear berganda dengan perhitungan SPSS 17.0 adalah sebagai berikut:

³⁹ Duwi Priyatno, *op.cit.*, hal. 53

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.199	.483		21.106	.000
popularitas calon	.102	.028	.237	3.626	.000
SSE	-.037	.037	-.066	-.983	.326
kondisi sospol	-.053	.021	-.161	-2.527	.012

a. Dependent Variable: partisipasi pol

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	8.33	10.63	9.66	.366	243
Residual	-7.692	1.419	.000	1.285	243
Std. Predicted Value	-3.631	2.650	.000	1.000	243
Std. Residual	-5.946	1.097	.000	.994	243

a. Dependent Variable: partisipasi pol

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y' &= 10,199 + 0,102 + (-0,037)X_2 + (-0,053)X_3 \\
 &= 10,199 + 0,102 - 0,037 - 0,053
 \end{aligned}$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 10,199; artinya jika popularitas calon (x1), SSE (X2) dan kondisi sosial politik (X3) nilainya adalah 0, maka partisipasi politik nilainya adalah 10,199.
- Koefisien regresi variabel popularitas calon (X1) sebesar 0,102; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan popularitas calon mengalami

kenaikan 1%, maka partisipasi politik (Y') akan mengalami kenaikan sebesar 0,102. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara popularitas calon dan partisipasi politik, semakin tinggi popularitas calon maka semakin meningkat partisipasi politik.

- Koefisien regresi variabel SSE (X_2) sebesar -0,037; artinya jika variabel independen lainnya tetap dan SSE mengalami kenaikan 1%, maka partisipasi politik (Y') akan mengalami penurunan sebesar -0,037. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara SSE dan partisipasi politik, semakin naik SSE maka semakin turun partisipasi politik.
- Koefisien regresi variabel kondisi sosial politik (X_3) sebesar -0,053, artinya jika variabel independen lainnya tetap dan kondisi sosial politik mengalami kenaikan 1%, maka partisipasi politik (Y') akan mengalami penurunan sebesar -0,053. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara kondisi sosial politik dan partisipasi politik, semakin naik kondisi sosial politik maka semakin turun partisipasi politik.

Nilai partisipasi politik yang diprediksi (Y') dapat dilihat pada *Casewise Diagnostics* (kolom *Predicted Value*) yang terdapat pada halaman lampiran. Sedangkan Residual (unstandardized residual) adalah selisih antara partisipasi politik dengan Predicted Value, Std Residual (standarized residual) adalah nilai residual yang telah terstandarisasi (nilai semakin mendekati 0 maka model regresi semakin baik dalam melakukan prediksi, sebaliknya semakin menjauhi 0 atau lebih dari 1 atau -1 semakin tidak baik model regresi dalam melakukan prediksi). Dengan demikian, maka model regresi yang baik dalam melakukan prediksi

adalah popularitas calon dan partisipasi politik karena terdapat hubungan positif. Sedangkan variabel SSE dan kondisi sosial politik masing-masing menunjukkan hubungan negatif dengan partisipasi politik.

BAB VI

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini difokuskan pada partisipasi politik masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Partisipasi politik dalam masyarakat sangat luas. Namun yang dibahas dalam penelitian ini adalah partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah. Tingginya angka partisipasi politik di Temanggung sebesar 81,03% merupakan suatu hal menarik untuk diteliti. Untuk mengetahui tingginya angka partisipasi tersebut maka perlu diteliti berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pilkada di Kabupaten Temanggung dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pilkada di Temanggung berjalan kondusif. Masing-masing pasangan calon mengikuti kegiatan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Selanjutnya masing-masing calon melaporkan dana kampanye untuk kemudian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Hasil olah data berupa tabel frekuensi menunjukkan bahwa kondisi sosial politik baik terlihat dari keaktifan masyarakat dalam kegiatan rapat-rapat desa terutama rapat-rapat RT/RW yang memang merupakan lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat Temanggung. Secara umum untuk wilayah Jawa Tengah keberadaan lingkungan RT/RW ternyata sangat berpengaruh besar bagi kehidupan sosial politik masyarakat. Karena dari lingkup RT/RW aspirasi masyarakat dapat disalurkan. Figur pasangan calon Bupati/Wakil Bupati juga merupakan tokoh

yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat Temanggung. Sebagian besar telah mengenal masing-masing pasangan calon jauh sebelum kampanye dimulai.

Berdasarkan hipotesa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat pengaruh/hubungan positif antara popularitas calon, status sosial ekonomi dan kondisi sosial politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kesimpulan dari analisis hubungan variabel dapat dilihat bahwa variabel independen yang pertama adalah popularitas calon. Hasil analisis tabel silang menunjukkan bahwa antara variabel popularitas calon dan partisipasi politik dalam pilkada terdapat hubungan positif. Selanjutnya, melalui analisis korelasi produk momen dan pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat korelasi/hubungan antara variabel popularitas calon dan partisipasi politik dalam pilkada.

Variabel independen yang kedua adalah status sosial ekonomi. Hasil analisis tabel silang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara variabel status sosial ekonomi dan partisipasi politik dalam pilkada. Setelah dilakukan analisis korelasi produk momen dan pengujian signifikansi menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara status sosial ekonomi dan partisipasi politik dalam pilkada.

Variabel independen yang ketiga adalah kondisi sosial politik. Hipotesisnya adalah adanya pengaruh/hubungan positif kondisi sosial politik masyarakat terhadap partisipasi politik dalam pilkada. Hasil analisis tabel silang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kondisi sosial politik dan partisipasi masyarakat dalam pilkada.

Sedangkan hasil analisis korelasi produk momen dan uji signifikansi menunjukkan bahwa terdapat korelasi/hubungan antara kondisi sosial politik dan partisipasi politik dalam pilkada.

Analisis selanjutnya yaitu regresi linear berganda menunjukkan model regresi yang baik dalam melakukan prediksi adalah popularitas calon dan partisipasi politik karena terdapat hubungan positif. Sedangkan variabel SSE dan kondisi sosial politik masing-masing menunjukkan hubungan negatif dengan partisipasi politik.

Berdasarkan hasil analisa pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada pada penelitian ini adalah popularitas calon dan kondisi sosial politik. Sedangkan hubungan yang positif berdasarkan analisis regresi hanya pada popularitas calon, sedangkan SSE dan kondisi sosial politik menunjukkan hubungan yang negatif terhadap partisipasi politik.

Implikasi Teoritik

Berdasarkan beberapa teori dan pendapat para ahli yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka pada penelitian ini di rumuskan tiga faktor yang diduga mempengaruhi partisipasi politik pada pilkada di Temanggung yaitu : popularitas calon, status sosial ekonomi, dan kondisi sosial politik.

Hasil penelitian tentang variabel yang berpengaruh terhadap partisipasi politik, jika dikaitkan dengan teori yang telah dijelaskan pada bab I berdasarkan pendapat Margaret Conway bahwa SSE mempengaruhi partisipasi politik secara

positif ternyata pada penelitian ini tidak terbukti. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi tertinggi pada responden yang berpendidikan rendah, sedangkan partisipasi paling rendah pada responden yang berpendidikan menengah, sedangkan responden yang berpendidikan tinggi partisipasinya dibawah yang berpendidikan rendah. Dengan demikian yang sesuai dengan hasil penelitian di Temanggung adalah pendapat Samuel Huntington yang menyatakan bahwa orang-orang yang berpendidikan rendah lebih berminat dalam memberikan suara pada pemilihan-pemilihan sedangkan orang-orang yang berpendidikan lebih baik kurang berminat untuk menyediakan waktu dan upaya untuk mengikuti pemilihan. Orang-orang yang berpendidikan rendah menganggap bahwa hari pemilihan adalah sebagai hari pesta sehingga mereka sangat antusias mengikutinya.

Variabel popularitas calon terbukti berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat Temanggung. Hal ini sejalan dengan pendapat Firmanzah yang menyatakan bahwa adanya relevansi antara kepopulisan seorang calon terhadap akseptansi publik. Ketika publik mengenal sosok dan kiprah seorang calon dengan baik, maka dapat dipastikan setengah kepercayaan telah terbangun, apalagi diikuti oleh pengalaman serta track record sang calon. Pada penelitian ini ketiga pasangan calon merupakan orang-orang yang telah mempunyai pengalaman dalam politik pemerintahan disamping itu pula sang calon merupakan figur yang dekat dengan masyarakat.

Kondisi sosial politik juga merupakan variabel yang berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Milbarth yang

menyebutkan bahwa lingkungan politik yang kondusif membuat orang senang berpartisipasi dalam kehidupan politik. Lingkungan sosial juga ikut mempengaruhi persepsi dan sikap seseorang dalam bidang politik. Masyarakat Temanggung yang dikenal mempunyai kepedulian sosial yang tinggi (ramah dan suka bergaul), dan berjiwa sosial tinggi akan lebih condong melakukan kegiatan politik.

Implikasi Praktikal

Pada penelitian ini popularitas calon dan kondisi sosial politik merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pilkada. Pada penelitian ini hanya mengungkapkan tiga variabel yang diduga mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada. Masih banyak faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh sesuai dengan kondisi di daerah penelitian. Hasil penelitian yang berbeda mungkin bisa ditemukan di lokasi penelitian lain dengan faktor-faktor yang lainnya pula. Selain yang diteliti pada penelitian ini masih banyak faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada yang perlu dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

Faktor-faktor lain yang diduga mempengaruhi partisipasi politik dalam pilkada antara lain: visi misi pasangan calon, kampanye, program kerja, afiliasi politik orang tua. Mengingat keterbatasan peneliti, maka perlu kiranya diteliti lebih lanjut faktor-faktor tersebut yang diduga berpengaruh terhadap partisipasi politik dalam pilkada.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa mendatang. Semoga pelaksanaan pilkada di Temanggung bisa menjadi cerminan bagi pelaksanaan pilkada di daerah lainnya. Keberhasilan Temanggung melaksanakan pilkada dengan situasi yang kondusif serta dibarengi partisipasi masyarakatnya yang tinggi patut dijadikan sebagai satu rujukan.

Demikian pula dari segi penggunaan anggaran sangat efisien mencegah pemborosan anggaran biaya pilkada (*high-cost democracy*). Penggabungan dua pilkada bisa dijadikan pertimbangan bagi stakeholder karena terbukti efisien dari segi waktu dan biaya juga menghindari kejenuhan politik (*political fatigue*) masyarakat karena pelaksanaan pilkada yang berulang-ulang.

KEPUSTAKAAN

Buku Teks

- Amirudin, dan Bisri A. Zaini., 2006. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi., 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam., 1998. *Partisipasi dan Partai Politik (sebuah bunga rampai)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiarjo, Miriam., 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John. W., 2003. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications.
- Conway, M. Margaret., 1985. *Political Participation in the United States*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
- Conway, M. Margaret., 1992. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Conway, M. Margaret., 2004. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Eriyanto., 2007. *Teknik Sampling: Analisis Opini Publik*. Yogyakarta: LKIS.
- Firmansyah., 2007. *Marketing Politik : antara pemahaman dan realitas*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Gabriel, A. Almond dan Sidney Verba., 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*: terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Bina Aksara, Co.
- Gaffar, Affan., 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony., 1984. *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. University of California.
- Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan., 1990. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lasswell, Harold. ,1958. *Politics: Who Gets What, When, How*. New York: Meridian Books.
- Lipset, Seymour Martin., 2007. *Political Man Basis Sosial Tentang Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mas'ood, Mohtar dan MacAndrews., 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Michels, Robert., 1968. *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendency of Modern Democracy*. London: Free Press.
- Pradhanawati, Ari., 2005. *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. , Surakarta: KOMPIP.
- Prihatmoko, Joko J., 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyatno, Duwi., 2009. *Mandiri Belajar SPSS; Untuk analisis Data dan Uji Statistik*. Yogyakarta: Mediakom.
- Rush, Michael dan Althoff, Philip., 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Said, Gatara, A.A dan Dzulkiah, Said, Moh., 2007. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Jakarta: CV. Pustaka Setia.
- Surbakti, Ramlan., 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- SVD, Bernard Raho., 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Sugiyono., 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tim Dokumentasi KPU Temanggung., 2008. *Potret Demokrasi Wong Temanggung*. Temanggung: KPU Temanggung.
- Upe, Ambo., 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Penelitian

- Achmad, Surandim., 2007. *Perilaku Pemilih Masyarakat Pedesaan dalam Pilkada langsung di Kabupaten Pati: Studi Kasus Pilkada Langsung di Desa Karaban dan Desa Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, Tanggal 24 Juli 2006*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan).

Jurnal

- Ridwan, Asep., 2004. "Memahami Perilaku Pemilih pada Pemilu 2004 di Indonesia". *Jurnal Demokrasi dan HAM*, vol.4, No.1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Sekretariat Negara.

Artikel, Harian, dan lain-lain.

Mallarangeng, Rizal., 2001. "Konsensus Elite Dan Politik Kekuatan". *Harian Kompas*, 25 April 2001.

Pradhanawati, Ari., 2006. "Partisipasi Pemilih dalam Pilkada". *Harian Kompas*, 9 Agustus 2006.

Pradhanawati, Ari., 2006. "Golput Pilkada Jateng Dominan". *Harian Suara Merdeka*, 23 Juni 2008.

Danang, Purwanto., 2008. "Kesiapan KPU Temanggung dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati". *Buletin Ayo Milih*, Edisi ke 3, Bln November 2008

Danang, Purwanto., 2008. "Belajar dari 2004, Refleksi Penyelenggaraan". *Buletin Ayo Milih*, Edisi ke 4 Bln Desember 2008

Lingkarana Survei Indonesia., 2007. "Preferensi dan Peta Dukungan Pemilih Pada Partai Politik". *Kajian Bulanan*, Edisi 06 Oktober 2007.



Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

**KUESIONER PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2008**

Penelitian oleh Marlina Tarigan (NIM D4B007022) untuk menyelesaikan gelar Magister Ilmu Politik pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro)

PENTING:
Identitas Anda tidak akan dipublikasikan.
Jawaban yang Anda berikan dijamin
kerahasiaannya.

**DAFTAR PERTANYAAN
(QUESTIONNAIRES)**

Nomor Responden :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat : **TPS** **Desa/Kel**
Kec.

IDENTIFIKASI RESPONDEN

1. Jenis kelamin : ☐ Laki-laki
☐ Perempuan
2. Kelompok usia : ☐ ≤ 19 tahun
☐ 20-29 tahun
☐ 30-39 tahun
☐ 40-49 tahun
☐ ≥ 50 tahun



Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

3. Status perkawinan : ☐ Belum kawin

☐ Kawin

☐ Janda/Duda

4. Agama : ☐ Islam

☐ Katolik

☐ Kristen Protestan

☐ Hindu

☐ Budha

☐ Lainnya

(sebutkan)

A. PARTISIPASI POLITIK

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengikuti pemungutan suara pada pelaksanaan pilkada tahun 2008?

☐ Ya, datang ke TPS dengan kesadaran sendiri

☐ Ya, datang ke TPS dengan ajakan orang lain

☐ Tidak datang ke TPS



Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

2. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i menggunakan hak suara/mencoblos dalam pilkada?

☐ Ya

☐ Tidak

B. POPULARITAS CALON

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengenal /mengetahui semua pasangan kandidat pada pilkada Temanggung tahun 2008?

☐ Kenal

☐ Tidak Kenal

2. Sejak kapan Bapak/Ibu/Sdr/i mengenal pasangan kandidat pilkada Temanggung tahun 2008?

☐ sebelum kampanye

☐ pada saat kampanye

☐ saat pencoblosan

3. Siapa pasangan kandidat yang paling Bapak/Ibu/Sdr/i kenal?

☐ Hasyim-Budiarto

☐ Bambang Sukarno-Fuad

☐ M. Irfan-Adji



Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

C. FAKTOR SOSIAL EKONOMI

1. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu/Sdr/i yang ditempuh:

- ☐ Sarjana (S1/S2)
- ☐ SMA
- ☐ SMP
- ☐ SD/Buta huruf

2. Apa jenis pekerjaan utama Bapak/Ibu/Sdr/i?

- ☐ Pegawai Negeri Sipil
 - ☐ Wiraswasta
 - ☐ Buruh
 - ☐ Petani
 - ☐ Lainnya
- Sebutkan

3. Apa jenis pekerjaan sampingan Bapak/Ibu/Sdr/i?

- ☐ Wiraswasta
 - ☐ Buruh
 - ☐ Petani
 - ☐ Lainnya
- Sebutkan



Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

4. Besarnya penghasilan:

- ☐ < 600.000 (UMK)
- ☐ Rp 600.001,- s.d Rp 1.000.000,-
- ☐ Rp 1.000.001,- s.d Rp 1.500.000,-
- ☐ Rp 1.500.001,- s.d Rp 2.000.000,-
- ☐ > Rp 2.000.000,-

D. FAKTOR SOSIAL POLITIK

1. Dalam kegiatan bermasyarakat kegiatan apakah yang Bapak/Ibu/Sdr/i ikuti?

- ☐ Pengajian
- ☐ Posyandu
- ☐ Selapanan RT/RW
- ☐ Arisan PKK RT/RW
- ☐ Lainnya

Sebutkan

2. Apakah kedudukan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam kampanye pemilihan kepala daerah

Temanggung Tahun 2008?

- ☐ Berperan sebagai pelaksana parpol
- ☐ Berperan sebagai simpatisan
- ☐ Lainnya

Sebutkan



Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

3. Apakah status Bapak/Ibu/Sdr/i dalam kampanye tersebut?

☐ Ketua Tim/Pengurus

☐ Anggota Tim Kampanye

☐ Lainnya

Sebutkan

4. Peran bapak/Ibu/Sdr/i selama persiapan pelaksanaan pilkada:

☐ Sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

☐ Sebagai Petugas Keamanan

☐ Lainnya

Sebutkan

5. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i menggunakan hak suara/mencoblos dalam pilkades?

☐ Ya

☐ Tidak

6. Bagaimana keterlibatan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam kegiatan rembug desa/dusun/murenbang,dan lainnya dalam lingkungan masyarakat?

☐ Sebagai Ketua

☐ Anggota

☐ Tidak terlibat sama sekali



Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

7. Dalam rapat/pertemuan yang manakah Bapak/Ibu/Sdr/i hadir/diundang?

☐ Rapat desa/dusun/musrenbang

☐ Rapat RT/RW

☐ Lainnya

Sebutkan

8. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i mengikuti kegiatan Rapat desa/rembug
dusun/musrenbang, dan lainnya?

☐ Ya, selalu

☐ Ya, kadang-kadang

☐ Tidak pernah

